



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan semoga kita selalu dalam limpahan karunia dan lindungan-Nya, serta atas berkat rahmat-Nya pula Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2019-2024 ini dapat disusun sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen ini memuat tentang gambaran pelayanan, tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selama lima tahun mendatang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta memuat strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan selama lima tahun mendatang.

Rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2022

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung,

FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN	
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11
2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2	Ketersediaan Sumberdaya	29
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4	Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	59
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
	DAERAH.....	62
3.1	Identifikasi Permasalahan.....	62
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3	Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 ...	71
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	77
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	77
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	77
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	77



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	79
4.1 Tujuan dan Sasaran	79
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	86
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	112
BAB VIII PENUTUP	114
8.1 Pedoman Transisi.....	114
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	114
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

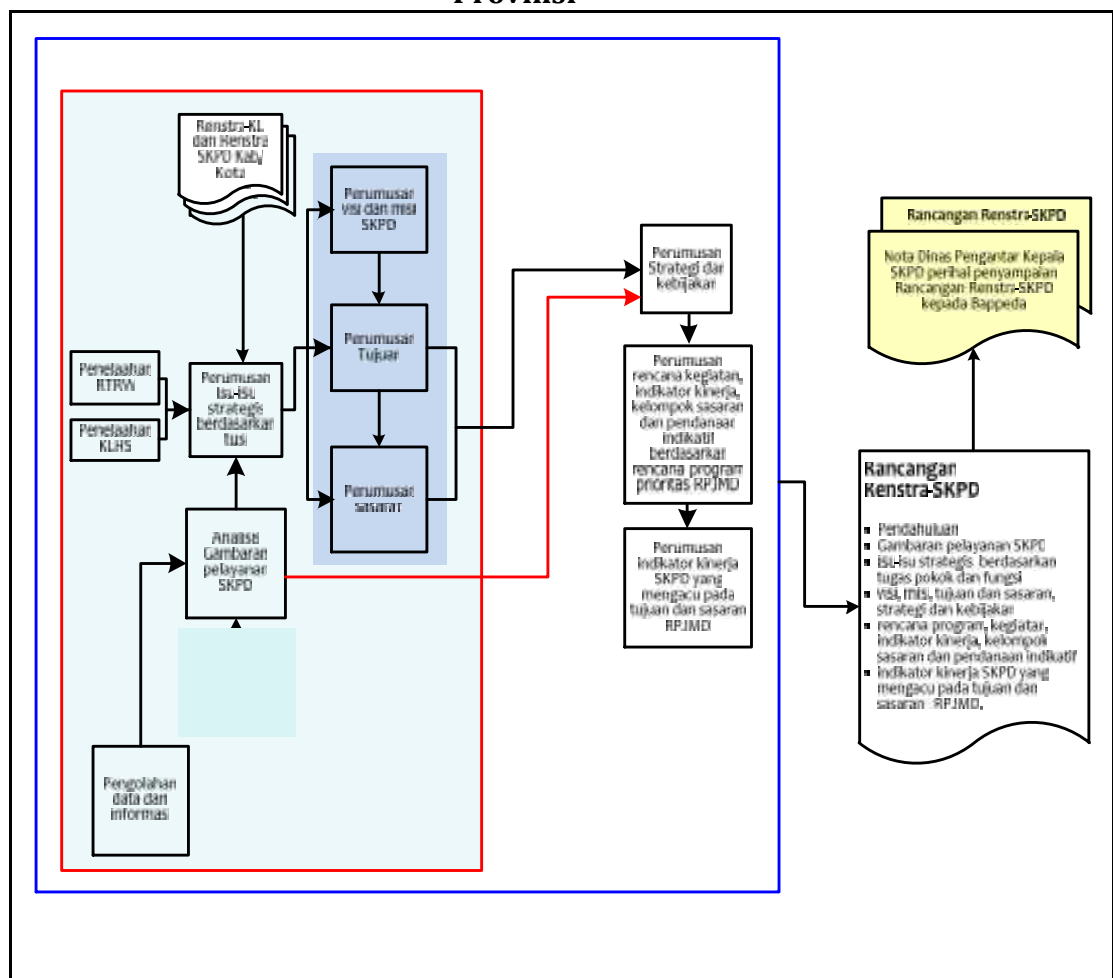
1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir



- (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 20. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 21. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);



32. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
33. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
35. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
43. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
44. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
45. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan yang ada berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Telaah Visi dan Misi Gubernur Terpilih, Telaah Renstra K/L, dan penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini akan diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini akan diuraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai matrik renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini akan diuraikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang telah dilaksanakan.

BAB VIII. Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok ***Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai ***Fungsi:***

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- c. pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Struktur Organisasi

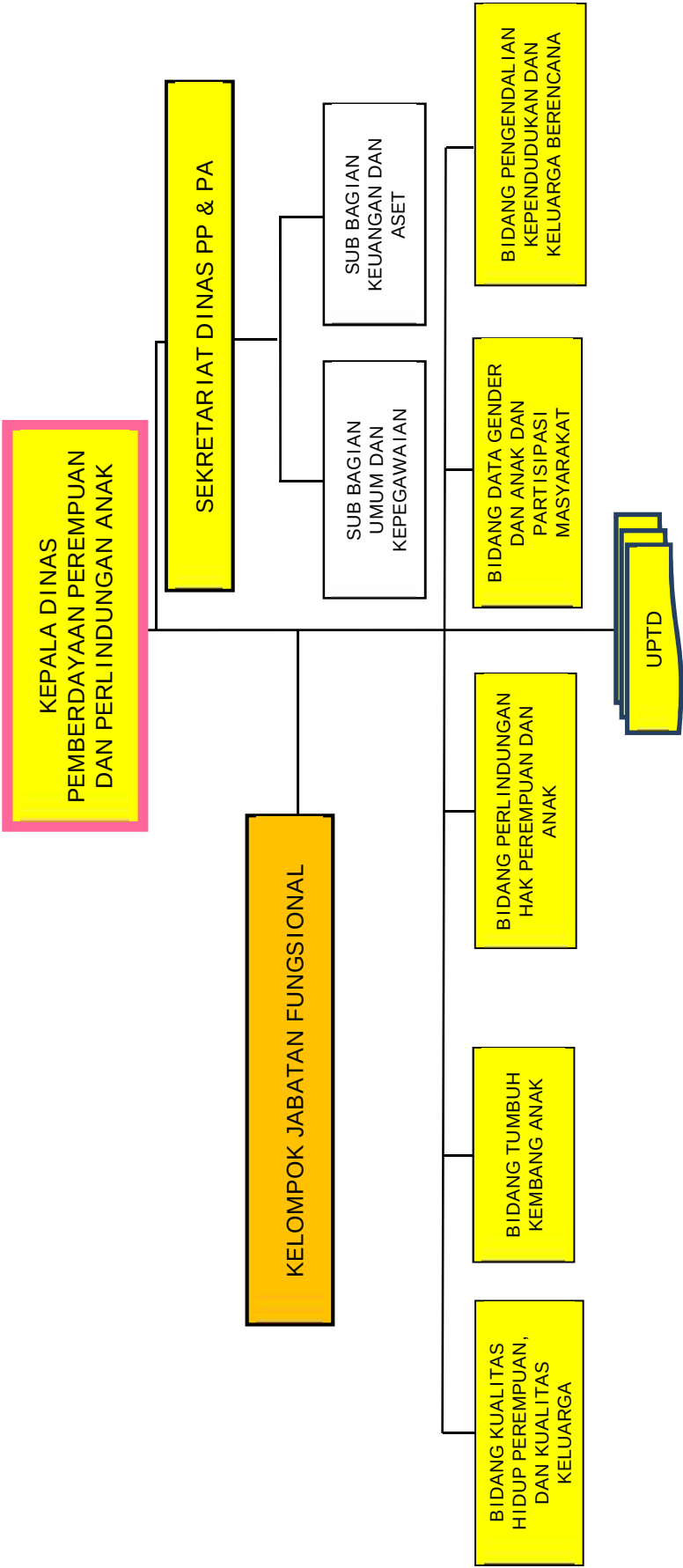
Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan hasil pemetaan Tipe A dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- d. Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- f. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat;
- g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

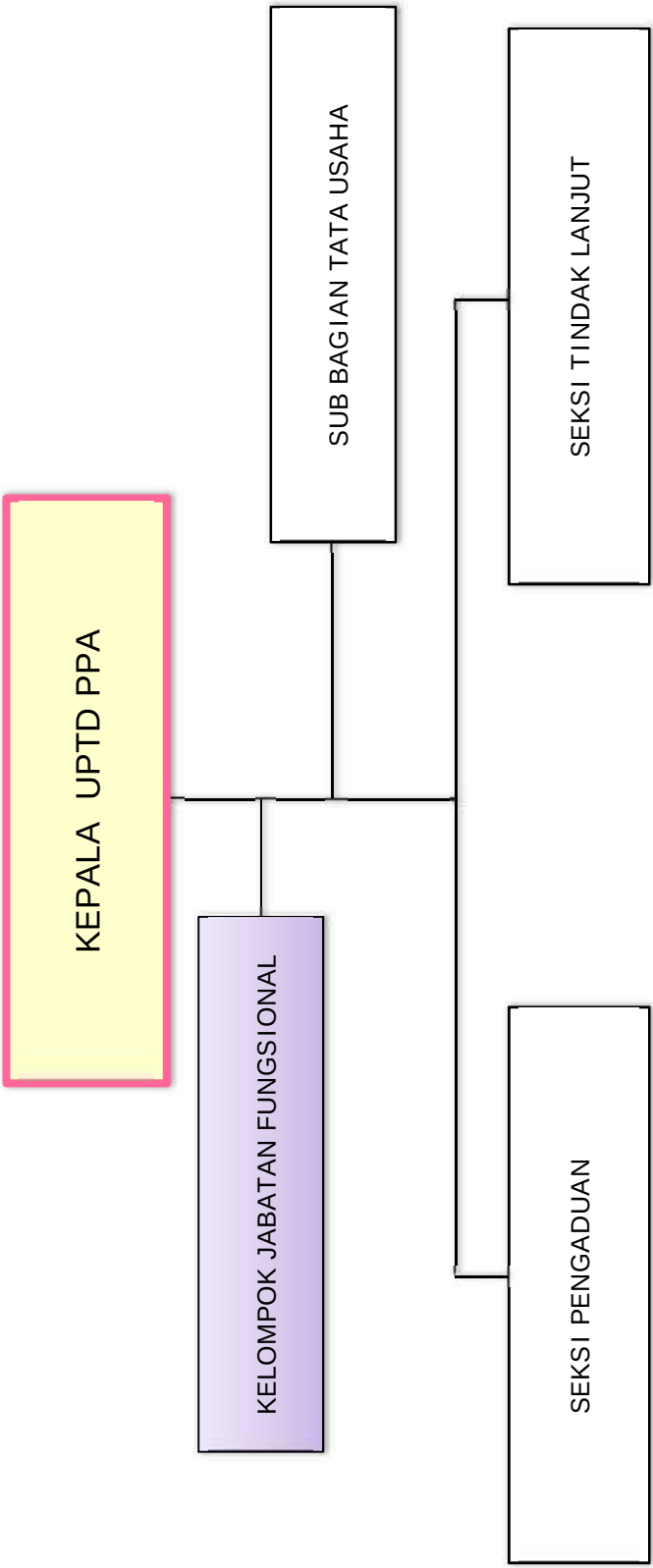


STRUKTUR ORGANISASI (TIPE A) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG





STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG





Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi :

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota;



- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan Kesekretariatan Dinas sebagai pendukung tugas teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. SEKRETARIAT

- 1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan dan aset, umum, dan kepegawaian.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan dan aset;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang perencanaan program dan evaluasi; dan



- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan hukum;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. menyusun rencana kebutuhan barang, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pendistribusian dan pemanfaatan barang kantor;
 - h. menyiapkan bahan administrasi dalam rangka penghapusan barang;



- i. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

❖ Sub Bagian Keuangan dan Aset

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan anggaran, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pembinaan perbendaharaan.
2. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran berlanja;
 - b. menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
 - d. melaksanakan pembukuan dan akuntansi;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data keuangan dan aset untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan aset;
 - f. mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional terkait keuangan dan aset;
 - g. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;
 - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan aset serta perbendaharaan;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan



- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga;



- f. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Tumbuh Kembang Anak

1. Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap ruang lingkup tumbuh kembang anak.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;



- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
 - f. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
 - h. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, pengasuhan, keluarga dan lingkungan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Tumbuh Kembang Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

1. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindungan hak perempuan dan anak.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan *eksploitasi*;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan *stigmatisasi*, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan *eksploitasi*;
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi,



- perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan *eksploitasi*;
- d. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan *stigmatisasi*, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan *eksploitasi*;
 - e. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan *stigmatisasi*, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan *eksploitasi*;
 - f. penyiapan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan *stigmatisasi*, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan *eksploitasi*; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - 4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



F. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat

1. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Data Gender dan Anak, Partisipasi Masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi;



- h. pengelolaan sistem data gender dan anak serta pengelolaan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA); dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat.
2. Rincian Tugas Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



4. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

H. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Tugas dan Fungsi

1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. pelaksanaan mediasi; dan
 - f. pelaksanaan pendampingan korban.

Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengaduan;
 - d. Seksi Tindak Lanjut dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.



2. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
3. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Uraian Tugas

1. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.



3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
4. Seksi Pengaduan mempunyai tugas tugas menerima pengaduan dan menyiapkan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi:
 - a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - c. melakukan pengelolaan kasus;
 - d. melindungi korban di penampungan sementara; dan
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.



2.2 Ketersediaan Sumberdaya

Ketersediaan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung didukung oleh 78 orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan golongan yang berbeda-beda.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan S2 dengan jumlah 29 orang yang diikuti oleh latar belakang pendidikan S1 dengan jumlah 24 orang. Sedangkan untuk pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan D3 berjumlah 5 orang dan SMA Sederajat berjumlah 20 orang.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	5	8	7	-	20
2	D3	3	2	-	-	5
3	S1	10	12	-	2	24
4	S2	2	27	-	-	29
Jumlah						78

Tabel 2.2 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan golongan III dengan jumlah 31 orang yang diikuti golongan IV dengan 22 orang dan golongan II dengan jumlah 16 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	8	16
2	Golongan III	11	20	31
3	Golongan IV	1	21	22
Jumlah				69



Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.3 menunjukkan kondisi sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	✓		1
2	Mini Bus/Mobil	✓		6
3	Sepeda Motor	✓		4
4	Lemari Besi	✓		2
5	Brankas	✓		1
6	AC	✓		10
7	Televisi	✓		6
8	Kamera	✓		2
9	Laptop	✓		10
10	Printer	✓		12
11	PC Komputer	✓		6

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :



**Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

Tabel 2.4
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung 2015-2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Persentase SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	3.6%	18.1	36.3	92.73	100%	5.45	63.64%	92.73%	92.73%	100%	151.3	351.58	255.45	100%	100%
			%	%	%	%	%	%					%	%	%		
		Persentase Peningkatan Keterampilan Perempuan Miskin Pedesaan	24.06	41.18	67.91	75.94	100%	24.06	41.18%	68.98%	77.01%	101.0	100%	100%	101.57	101.41	101.07
			%	%	%	%	%	%				7%			%	%	%
2	Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak se Provinsi Lampung	1 Kab	0	3	3	6	1 Kab	0	1 Kab	3 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	100%	0	33.33%	100%	116.67
					Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota										%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Tersesainya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	80%	80%	80%	80%	82%	80%	80%	80%	80%	82%	100%	100%	100%	100%	100%

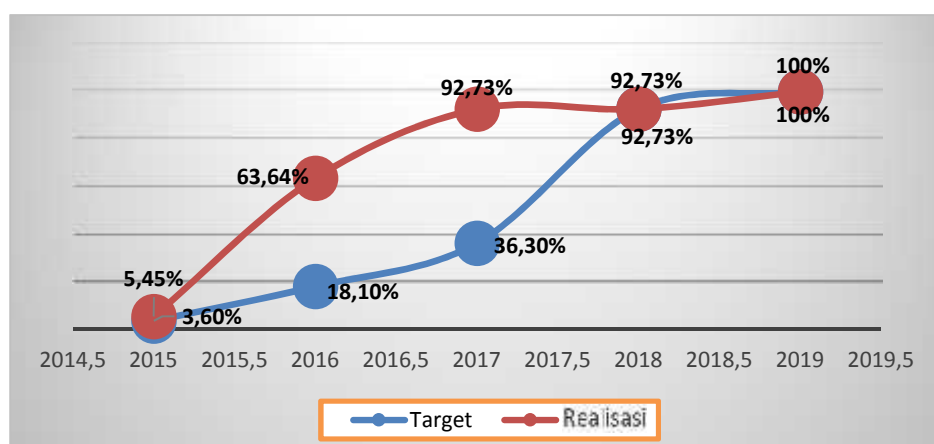
Sumber : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPPA Tahun 2015 - 2019



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung periode 2015-2019 memiliki 3 sasaran utama yang terdiri dari 4 indikator sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesenjangan Gender terdiri dari 2 indikator yaitu :

a. **Persentase SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender** didukung melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Kegiatan Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG dengan target kinerja pada tahun 2015 adalah 3,6% OPD Provinsi yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender dengan realisasi 5,45%, capaian kinerja adalah 151,3%. Target tahun 2016 untuk ARG yaitu 18,1% dengan realisasi 63,64% dan capaian kinerja 351,58%. Tahun 2017 target OPD yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender adalah 36,3% realisasi 92,73% dan capaian kinerja 255,45%. Pada tahun 2019 target OPD yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender yaitu 100%, realisasi kinerja 100%, hasil adalah 100% OPD yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender.



Grafik 1. Grafik Capaian Kinerja SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender



b. Persentase Peningkatan Keterampilan Perempuan Miskin

Pedesaan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan dan Kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif dengan target kinerja tahun 2015 adalah 24,06% (450 orang) dengan capaian kinerja 100% (450 orang). Tahun 2016 target adalah 41,18% (770 orang) dan dengan capaian kinerja 100% (770 orang). Pada tahun 2017 target Bimtek ekonomi kreatif yaitu 67,91% (1270 orang), dengan realisasi sebesar 77,01% (1290 orang) dan capaian kinerja 101,57%. Tahun 2018 target kinerja yaitu 75,94% (1420 orang) dengan realisasi 77,01% (1440 orang) dan capaian kinerja 101,41%. Tahun 2019 target kinerja yaitu 100% (1870 orang), realisasi kinerja 101,07% (1890 orang), Capaian kinerja adalah 101,07%. Target Bimtek ekonomi kreatif merupakan kumulatif selama 5 (lima) tahun periode 2015-2019 dengan total target 1870 orang yang mengikuti Bimtek Ekonomi Kreatif dan Realisasi sampai dengan akhir periode 2015-2019 yaitu tahun 2019 adalah 1890 orang yang mengikuti Bimtek Ekonomi Kreatif dari 15 Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung.

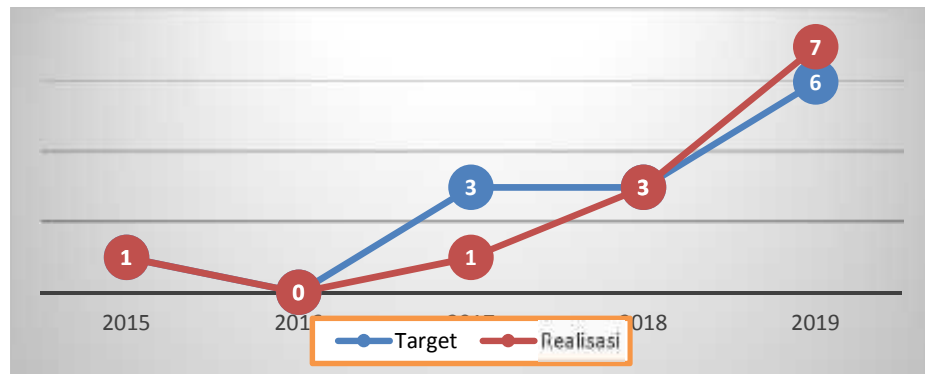


Grafik 2. Grafik Capaian Kinerja Peningkatan Keterampilan Perempuan Miskin Pedesaan



2. Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari 1 indikator yaitu :

- a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak se Provinsi Lampung** dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Pelecehan Seksual dengan kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan target kinerja pada tahun 2015 adalah 1 kabupaten dengan hasil 1 kabupaten yaitu **Lampung Selatan** mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memiliki target 3 Kabupaten/Kota, hasil adalah 1 kabupaten yang mendapatkan predikat Layak Anak yaitu **Kabupaten Lampung Selatan**, sehingga capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 33.33%. pada tahun 2018 target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk Kabupaten/Kota Layak Anak adalah 3 kabupaten/Kota dengan hasil 3 Kabupaten dan Kota yang memperoleh predikat layak anak yaitu **Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung**. Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menargetkan 6 Kabupaten/ Kota untuk Kabupaten/Kota Layak Anak, Realisasi Kinerja 116,67%, Hasil adalah Provinsi Lampung meraih **Penghargaan Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak** pada puncak acara Peringatan Hari Anak Nasional **beserta 7 (tujuh)** Kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu : **Lampung Timur dan Bandar Lampung** dengan predikat **Tingkat Madya**, sedangkan **Lampung Selatan, Pringsewu, Metro, Way Kanan, dan Lampung Tengah** mendapatkan Predikat **Tingkat Pratama**.



Grafik 3. Diagram Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Layak Anak

3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 1 indikator yaitu :

- a. **Persentase terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak** dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking, KDRT, dan Pelecehan Seksual dengan kegiatan Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-LIP Provinsi Lampung dengan target kinerja pada tahun 2019 yaitu 82% penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan, realisasi kinerja adalah 100%. Periode tahun 2016-2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui UPTD P2TP2A-LIP telah melakukan penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 474 kasus yang terdiri dari 313 kasus kekerasan terhadap anak dan 161 kasus kekerasan terhadap perempuan. (Data sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019)

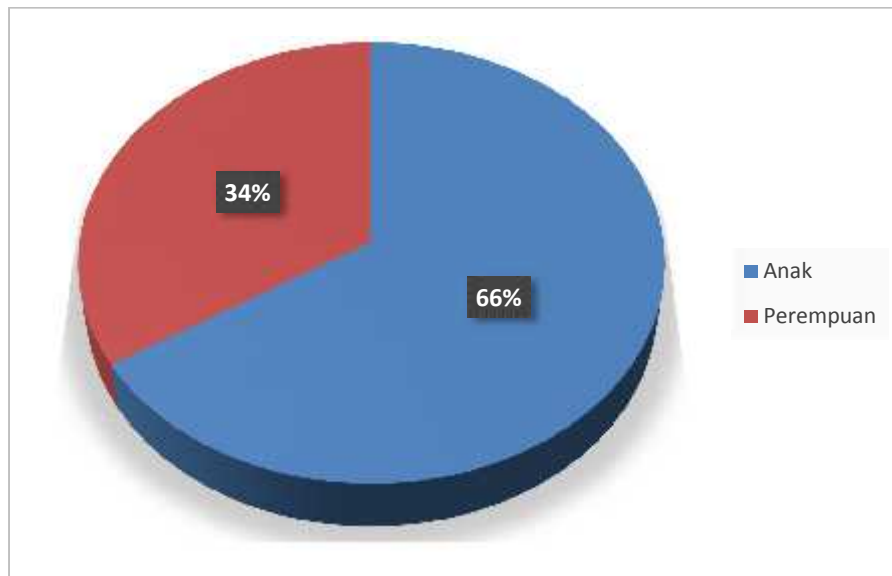
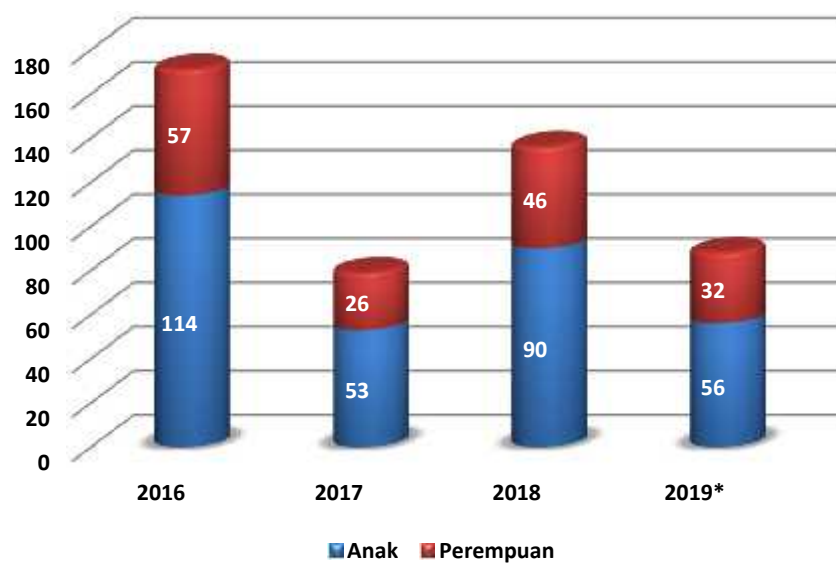


Diagram 1. Diagram kasus Kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A-LIP periode 2016-2019 berdasarkan jenis kelamin dan umur



Grafik 4. Grafik Kasus Kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A-LIP periode 2016-2019



Dari 474 penanganan kasus, terdapat 879 jenis kasus yang terdiri dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 408 kasus. Berikutnya adalah kasus pemerkosaan dengan 379 kasus, pelecehan seksual 76 kasus, sodomi 14 kasus dan penganiayaan sebanyak 2 kasus.

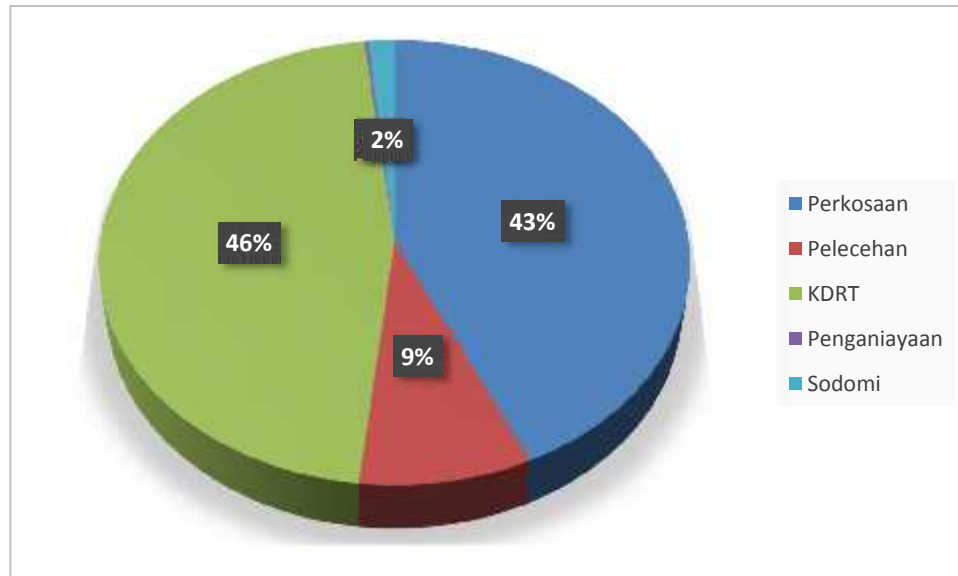


Diagram 2. Diagram jumlah kasus kekerasan periode 2016-2019 berdasarkan jenis kasus

B. Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Revisi Target Indikator Kinerja 2021-2024

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Revisi Target Indikator Kinerja 2021-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline			2020		Target Awal				Revisi Target			
				2018	2019	2020	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	-	0,73	0,80	2,82	0,90	1,00	1,01	1,02	2,82	3,00	3,10	3,20	3,20
2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Terselenggaranya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Lampung	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Kab / Kota	3	7	8	7	10	12	13	15	-	-	-	-	-
		Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	20 (3)	46,67 (7)	53,33 (8)	46,67 (7)	66,67 (10)	0,8 (12)	86,67 (13)	100 (15)	86,67 (13)	100 (15)	100 (15)	100 (15)	100 (15)
4	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	-	-	66,47	74,14	18,80	23,50	29,70	32,80	66,88	67,29	67,71	68,24	68,24
5	Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	-	0,87	1,65	1,33	1,03	1,02	1,01	-	-	-	-	-

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 memiliki 5 sasaran utama yang terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

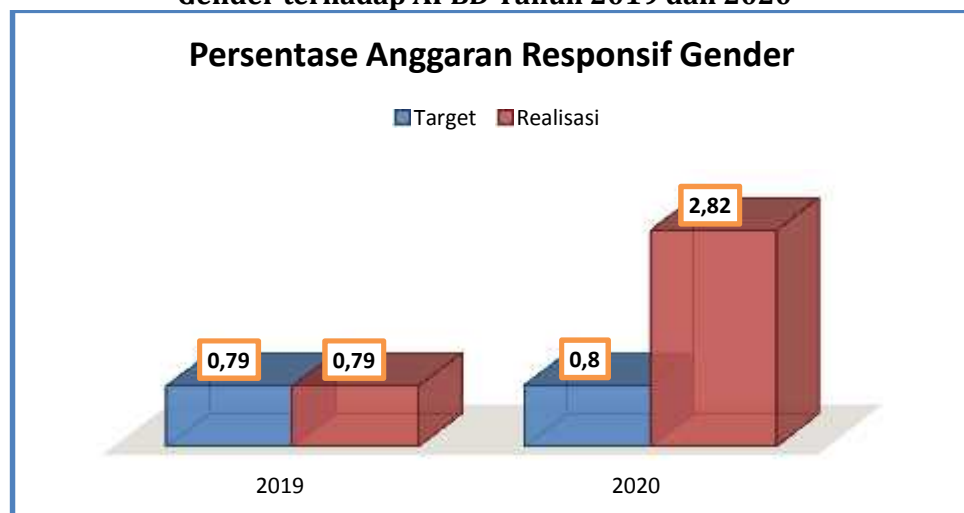
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	realisasi	%
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	0,80	2,82	352.5

Target dari indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2020 adalah sebesar 0.8%, realisasi kinerja sebesar 2.82%, sehingga capaian mencapai 352.5%.

Grafik 5.
Perbandingan realisasi indikator Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2019 dan 2020





Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD di Pemerintah Provinsi Lampung selalu meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 yaitu dari 0,79%, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,82%. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak kegiatan pada APBD Provinsi Lampung yang responsif gender dan telah dilakukan analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan tertuang dalam Gender Budget Statement (GBS).

Sasaran 2

Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

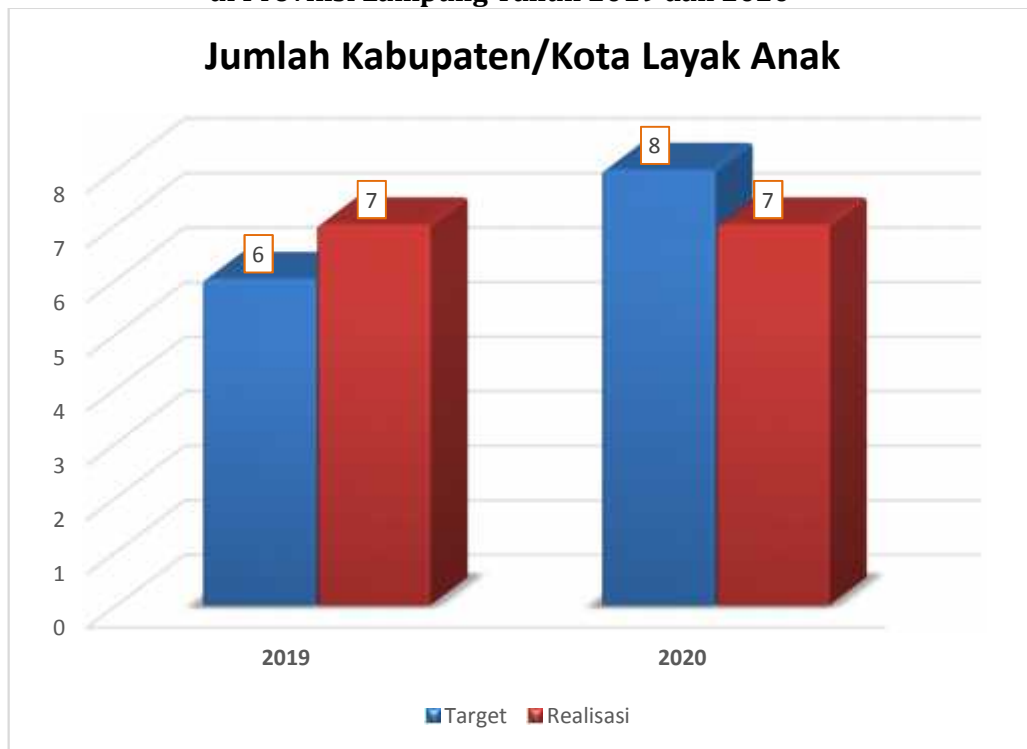
No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	realisasi	%
1.	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Kab/ kota	8	7	87,5

Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2015 hanya di 1 (satu) Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan sedangkan pada Tahun 2017 tidak ada 1 Kabupaten/Kota pun di Provinsi Lampung yang terpilih menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan, yaitu menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang terpilih yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung, sedangkan pada Tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Waykanan, Pringsewu, dan Lampung Tengah.



Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung sejalan dengan salah yaitu agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Diharapkan ke depannya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak maka target Pemerintah Provinsi Lampung menjadi Provinsi Layak Anak (Provila) dapat tercapai.

Grafik 6.
**Perbandingan realisasi indikator Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak
di Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020**



Tahun 2020 kementerian PPPA tidak melaksanakan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak dikarenakan pandemi covid-19, sehingga capaian Kabupaten/kota layak anak masih mengacu pada capaian tahun 2019 yaitu 7 Kab/kota Layak Anak, capaian kinerja sebesar 87,5%.

Gambar 2.1

Evaluasi dan Monitoring Percepatan KLA Tahun 2020



Gambar 2.2

Rakor RAD KLA Provinsi Lampung Tahun 2020



Dinas PPPA Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung Tahun 2020. Rakor ini melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan Lembaga Lainnya yang merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas KLA. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Konvensi Hak Anak dan Indikator KLA. Sehingga Rencana Aksi Daerah KLA dapat terintegrasi dengan Program yang ada di Perangkat Daerah dengan sistematis, terarah, sesuai dengan RPJMD dan tetap memperhatikan Renstra, dengan mengacu pada upaya pemenuhan hak anak mencakup penguatan terhadap lima klaster KLA.



Sasaran 3

Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	realisasi	%
1.	Persentase terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100

Grafik 7.

Perbandingan realisasi indikator Persentase Terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019 dan 2020

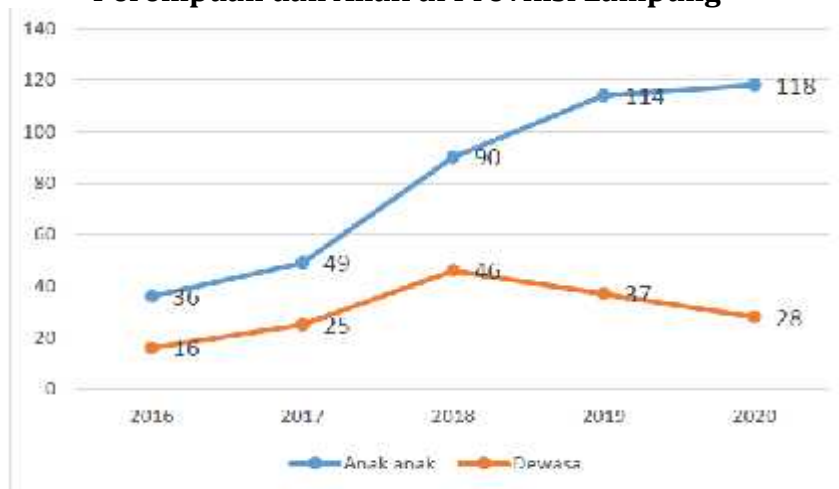


Target indikator kinerja Persentase Terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 adalah 100%, realisasi kinerja adalah 100% kasus kekerasan terlayani, capaian kinerja 100%.



Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Berdasarkan data kekerasan yang ditangani pada UPTD PPA, maka jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020 sebanyak 146 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 118 korban dan jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 28 orang. Trend penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 8. Data Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung



Sumber : Dinas PPA Provinsi Lampung, 2021

Dari data terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dewasa sejak Tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan jumlah kasus kekerasan pada anak tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena posisi anak yang lemah sehingga mudah sekali menjadi korban kekerasan baik oleh pihak luar maupun oleh pihak keluarga terdekat

Gambar 2.3
Penjemputan Korban TPPO



UPTD PPA Provinsi Lampung melakukan penjemputan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang berasal dari Kabupaten Tanggamus di Bandara Raden Intan II Lampung yang kemudian akan ditempatkan di Rumah Aman Dinas PPPA Provinsi Lampung.

Gambar 2.4
Pemeriksaan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual



Psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban kekerasan seksual (korban anak). Hasil pemeriksaan psikologis akan dipergunakan dalam kelengkapan berkas penyidikan dan untuk menguatkan keterangan korban.



Sasaran 4

Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

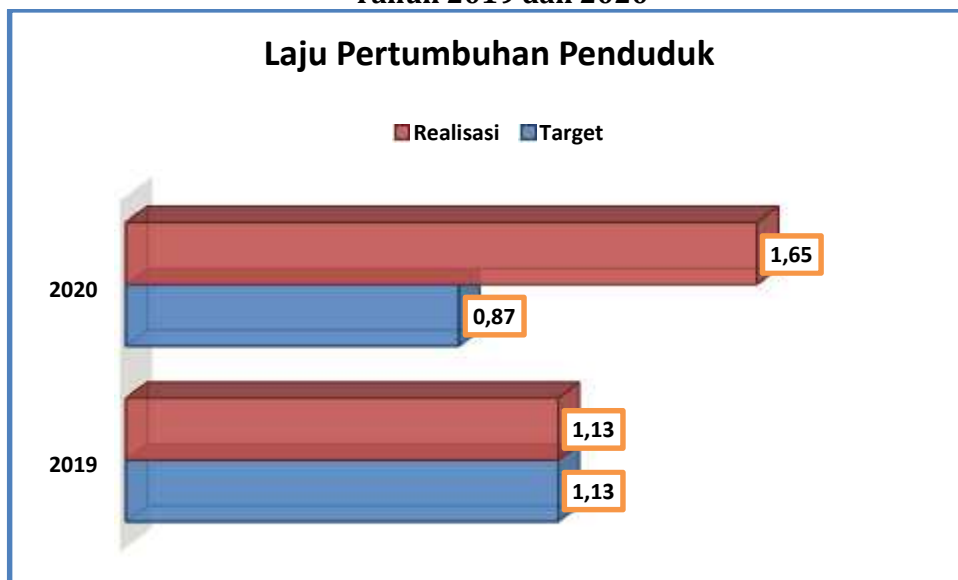
Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	realisasi	%
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.87	1,65	52,73

Target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 adalah 0.87%, realisasi 1,65% lebih tinggi dari target yang direncanakan sehingga capaian kinerja adalah 52.73%.

Grafik 9.
Perbandingan realisasi indikator Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2019 dan 2020



Gambar 2.5

Sosialisasi Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja



Dinas PPPA Provinsi Lampung melaksanakan Sosialisasi Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) sebagai upaya mempersiapkan pemahaman tentang keluarga berkualitas bagi remaja dan upaya mempersiapkan sumber daya dan keluarga yang berkualitas menuju keluarga sejahtera.



Sasaran 5

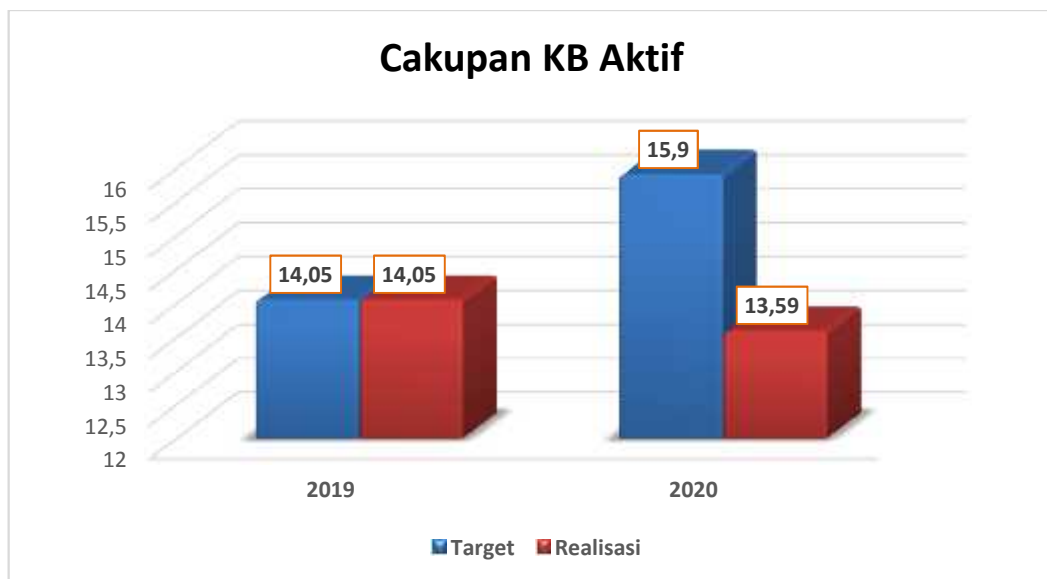
Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	realisasi	%
1.	Cakupan KB Aktif	%	15.9	13,59	85,47

Grafik 10.
Perbandingan realisasi indikator Cakupan KB Aktif
Tahun 2019 dan 2020



Target indikator kinerja Cakupan KB Aktif Tahun 2020 adalah 15,9%, realisasi kinerja 13,59%, Capaian kinerja 85,47%.

Gambar 2.6

Sosialisasi Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja



Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan reproduksi remaja, pencegahan pernikahan anak, dan menekan laju pertumbuhan penduduk maka Dinas PPPA mengadakan sosialisasi tentang Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja.

**Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

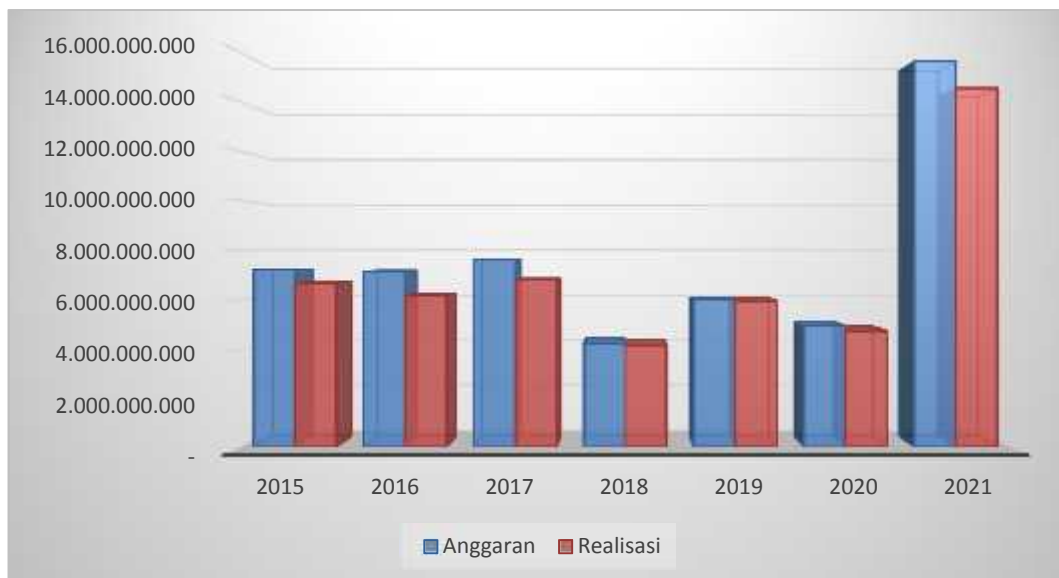


Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.)							Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Urusan Wajib	7.202.	7.137.	7.600.	4.219.	5.987.	4.933.	15.624	6.662.	6.160.	6.783.	4.153.	5.949.	4.735.	9.349.	92,5	86,3	89,2	98,4	99,3	95,	59,
Bukan	420	487.	000.	997.	352.	609,93	,965.2	899.	207.	174.	624.	085.79	910.56	502.04	1	1	5	3	6	99	84
Pelayanan	.000	800	000	200	000	0	50	163	770	951	011	9	0	2							
Dasar																					



Grafik 11. Grafik Anggaran dan Realisasi periode 2015-2021



Pada tahun 2017 anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi selama periode 2015-2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.600.000.000.00, anggaran tersebut untuk melaksanakan 9 Program dan 30 Kegiatan yang terdiri dari 4 Program dan 17 Kegiatan Administrasi Umum serta 5 Program dan 13 Kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Tahun 2018 penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi selama periode 2015-2019 dengan persentase 98,43%, anggaran tersebut untuk melaksanakan 9 Program dan 30 Kegiatan yang terdiri dari 4 Program dan 16 Kegiatan Administrasi Umum serta 5 Program dan 14 Kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Secara garis besar penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung periode 2015-2019 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini tentunya berdampak positif dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung.



C. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Grafik 11 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dalam 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi masih dibawah Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Berikut diagram IPM Provinsi Lampung tahun 2014-2020 :

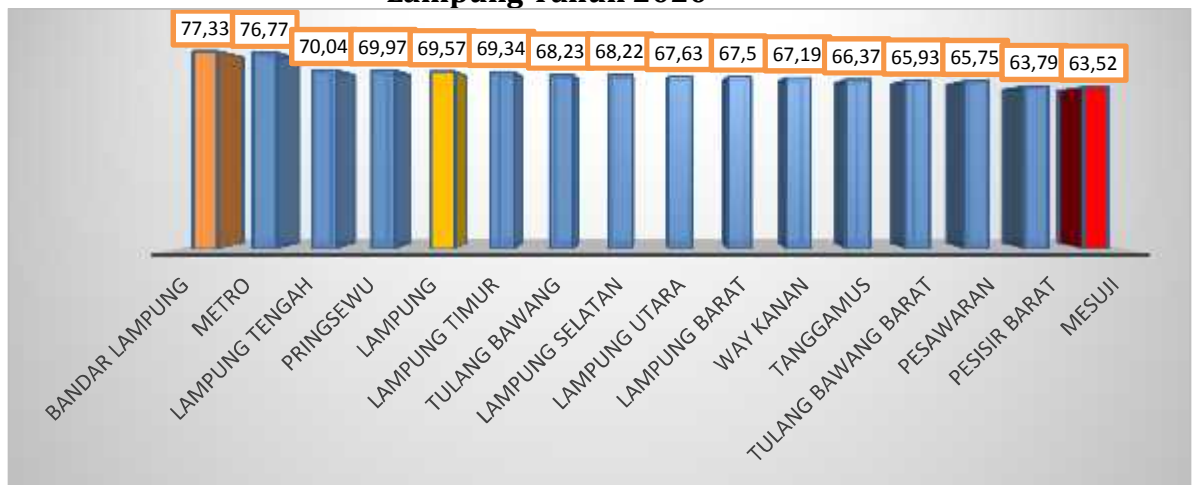
Grafik 12. Grafik IPM Provinsi Lampung dan Nasional 2014-2020



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020



**Grafik 13. Grafik IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung Tahun 2020**



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020

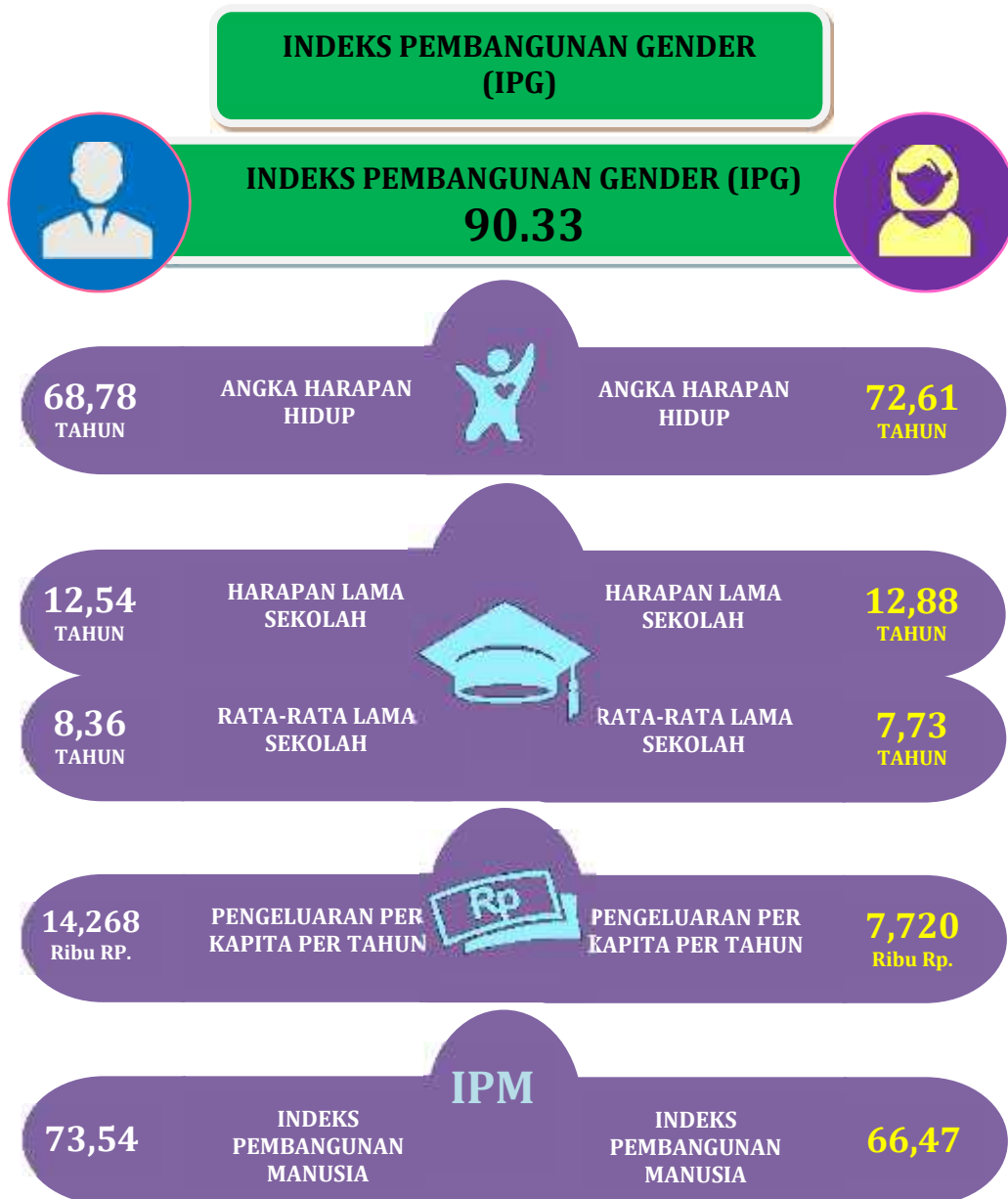
Berdasarkan Grafik 12, persentase IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 capaian IPM tertinggi terdapat pada Kota Bandar Lampung (77,33) diikuti Kota Metro (76,77) dan Kabupaten Lampung Tengah (70,04) sedangkan tingkat IPM terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji (63,52).

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir berada dibawah nasional dan pada Tahun 2020 bernilai 90,33 menurun 0,06 poin dibanding capaian Tahun 2019, sedangkan nasional bernilai 91,06. Angka ini menempati posisi ke-20 (dua puluh) dari 34 Provinsi se-Indonesia. Berdasarkan IPG Tahun 2020 tergambar bahwa pembangunan manusia yang dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan yang merefleksikan masih adanya disparitas gender.



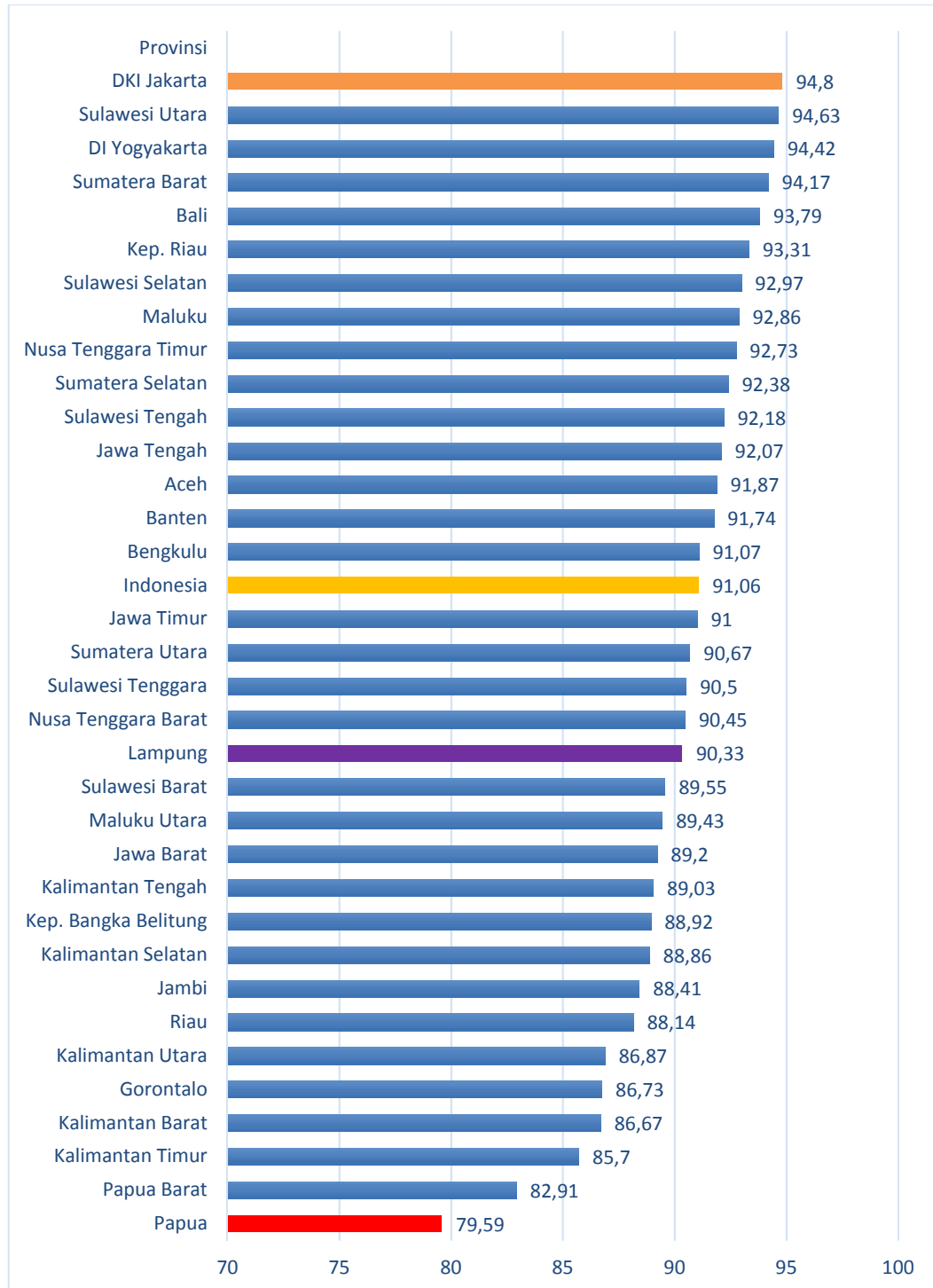
Kondisi Pembangunan Gender di Provinsi Lampung Tahun 2020 :



Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dimana pembangunan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Pembangunan laki-laki sudah berstatus “tinggi” dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih dikisaran angka 60-an dan berstatus “sedang”. Hal inilah yang menyebabkan IPG Provinsi Lampung masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2010-2020.



Grafik 14. Grafik IPG menurut Provinsi Tahun 2020

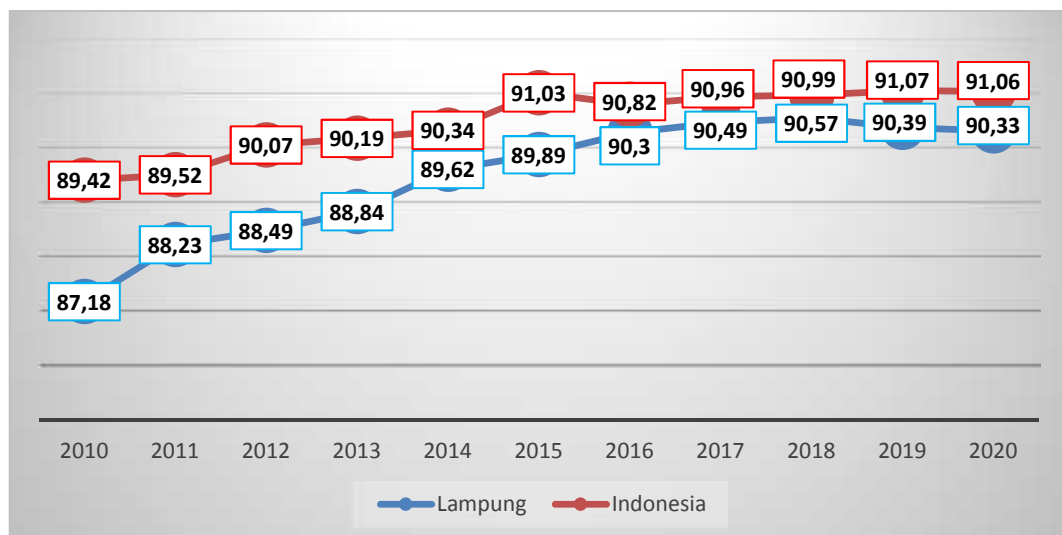


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021



Grafik 14 menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi tahun 2020. IPG mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi umur harapan hidup laki-laki dan perempuan, harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan laki-laki dan perempuan. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan.

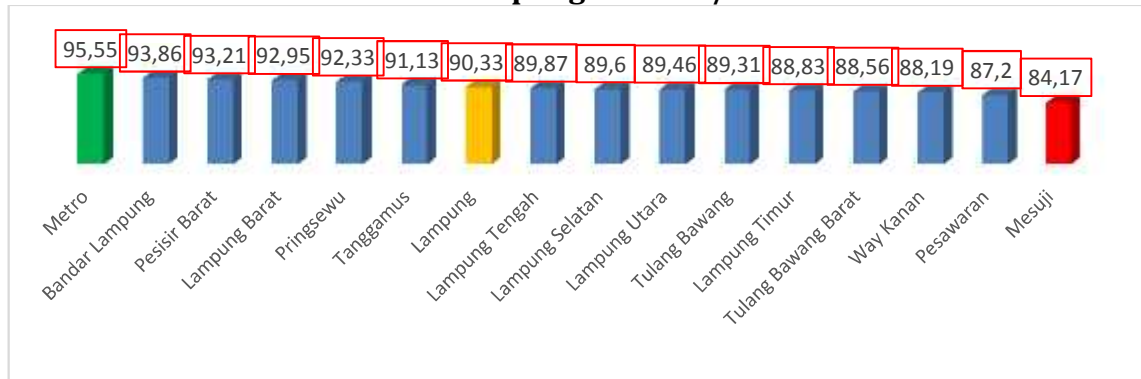
Grafik 15. Grafik IPG Provinsi Lampung dan Nasional 2010-2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021

IPG Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2010-2020 mengalami penurunan dan masih berada dibawah IPG Indonesia. Provinsi Lampung berada di Kuadran III yaitu Provinsi dengan IPM dan IPG di bawah angka Nasional, hal ini dikarenakan kualitas pembangunan manusia maupun pembangunan gender di Provinsi Lampung masih belum cukup memuaskan. Sehingga Kebijakan multisektor untuk perbaikan kualitas hidup perempuan serta mengurangi kesenjangan capaiannya dengan laki-laki sangat diperlukan.

Grafik 16. Grafik IPG Provinsi Lampung dan Kab/Kota tahun 2020



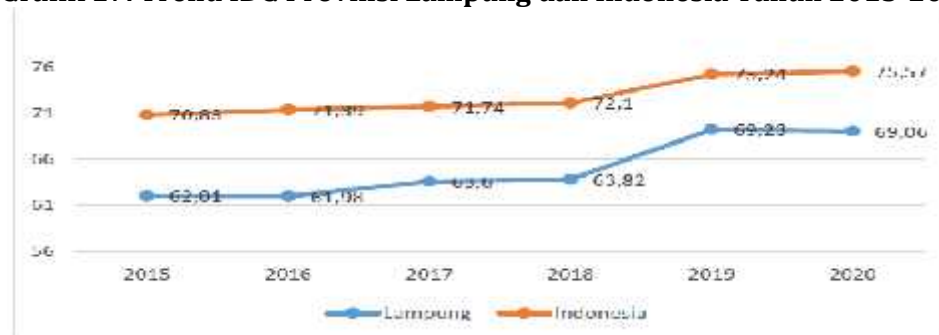
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021

Berdasarkan Grafik 15, IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 capaian IPG tertinggi terdapat pada Kota Metro(95,55) diikuti Kota Bandar Lampung (93,86) dan Kabupaten Pesisir Barat (93,21) sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji (84,17).

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama kurun waktu 2015-2020, IDG Provinsi Lampung mengalami penurunan, pada Tahun 2020 adalah 69,06 turun 0,17 poin dibanding capaian Tahun 2019 dan berada di bawah IDG Nasional (75,57). Trend IDG Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Grafik 17. Trend IDG Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015-2020

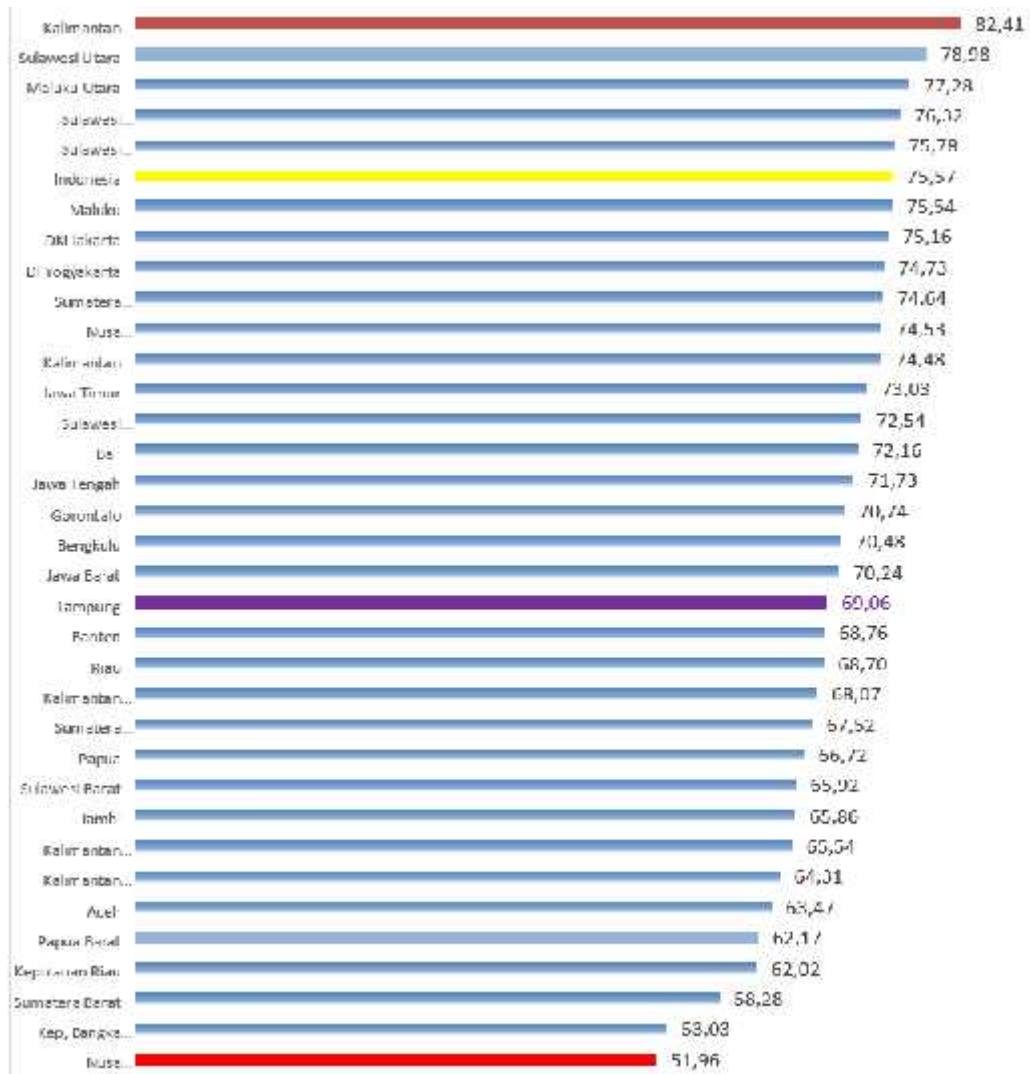


Sumber : BPS Provinsi Lampung 2020



Komposit pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah 20%, di bawah angka nasional (21,09%). Untuk komposit perempuan sebagai tenaga profesional Provinsi Lampung di tahun 2020 adalah sebesar 53,05%, berada di atas nasional (48,76%). Sedangkan untuk komposit sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Lampung di tahun 2020 yaitu 29,52% lebih rendah bila dibandingkan nasional di angka 37,26%.

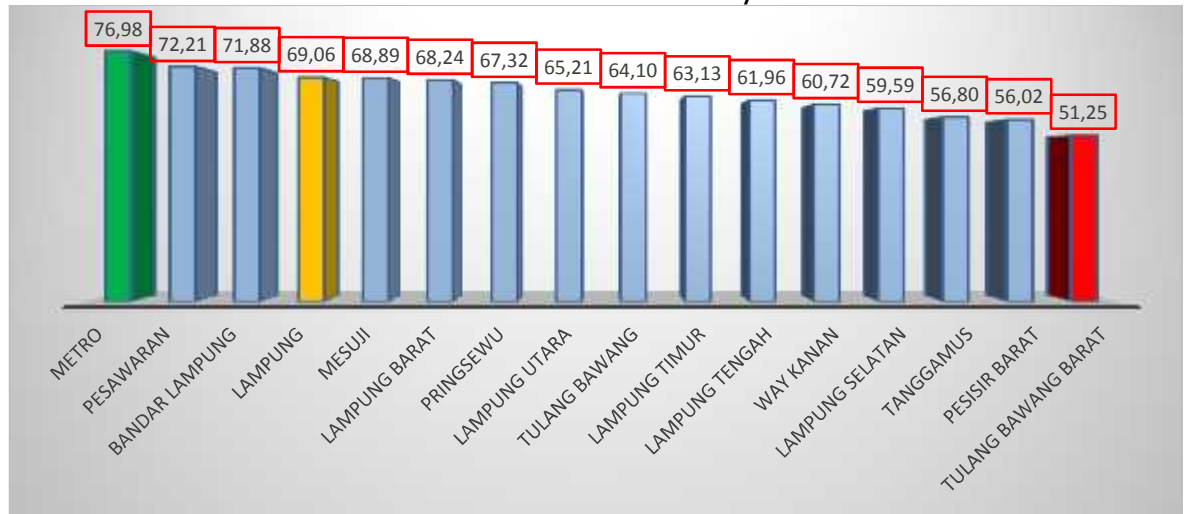
Grafik 18. Grafik IDG Menurut Provinsi Tahun 2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021



Grafik 19. Grafik IDG Menurut Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021

Berdasarkan Grafik 18, IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 capaian IDG tertinggi terdapat pada Kota Metro (76,98) diikuti Kota Pesawaran (72,21) dan Kota Bandar Lampung (71,88) sedangkan tingkat IDG terendah terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang Barat (51,25)

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.



- c. Angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan masih cukup rendah menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus-kasus KDRT, Pemerkosaan, Pecehan seksual, pedofil, dan penelantaran anak. Hal ini merupakan tantangan dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berbagai kasus yang cenderung meningkat, baik secara fakta di lapangan maupun karena semakin meningkatnya kesadaran untuk “melapor”, memerlukan penanganan yang terpadu antar berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dapat menjembatani atau melakukan fasilitasi koordinasi berbagai pihak agar dapat saling berbagi peran, tugas, dan fungsi di masyarakat untuk mengatasi, minimal untuk mengurangi kasus-kasus tersebut.
- g. Capaian pembentukan PATBM di 15 Kab/kota belum diiringi dengan pelatihan kader yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas.
- h. Belum semua Kab/kota menunjukkan komitmen kuat untuk optimalisasi penyelenggaraan PATBM melalui pembuatan regulasi daerah dan penyediaan anggaran



- i. Pencegahan dan penjangkauan terhadap korban perdagangan orang terhambat faktor koordinasi antar instansi dan faktor keluarga yang masih menutupi kasus tersebut.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) telah tertuang dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD, sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- d. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Adanya beberapa organisasi masyarakat dan Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
- f. Tersedianya potensi sumber daya manusia terlatih yang siap berpartisipasi dalam penyelenggaraan PATBM di tingkat daerah masing-masing.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas PPPA untuk menunjang kinerja perangkat daerah.
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - 3) Program dan Kegiatan masih berorientasi output, belum berorientasi outcome.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menurun dan termasuk kategori sedang dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 3) Masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.
 - 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - 5) Masih rendahnya anggaran responsif gender (ARG).
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (fisik, psikis, dan seksual).
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO.



- 3) Adanya budaya pembiaran terhadap kekerasan terhadap perempuan.
 - 4) Kurangnya koordinasi lintas sektor terkait penanganan kekerasan.
 - 5) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 6) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 7) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.
 - 2) Kondisi ekonomi yang menyebabkan banyak eksploitasi terhadap anak.
 - 3) Media Sosial yang bebas di lihat oleh anak.
 - 4) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 5) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - 6) kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap ABH, sehingga hak ABH sulit terpenuhi.
 - 7) Belum semua Kab/Kota mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
 - 8) Koordinasi instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) belum optimal sehingga penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perlindungan terhadap hak ABH sulit dipenuhi.



- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Baru 13 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (diluar TBB dan Mesuji).
 - 2) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, dan adanya anak terlantar.
 - 3) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 4) Belum semua satuan pendidikan termasuk kategori sekolah ramah anak (SRA).
 - 5) Puspaga yang sudah terbentuk baru di 8 Kabupaten/kota.
 - 6) Masih terdapat kasus kekerasan, penelantaran dan mempekerjakan anak usia sekolah (dibawah umur).
 - 7) Belum terbentuknya forum anak di kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan dan belum diikutsertakannya Forum Anak dalam musrenbang.
 - 8) Belum terpenuhinya sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- g. Permasalahan terkait dengan keluarga berencana
 - 1) Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belum maksimal.
 - 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dalam RPJMD adalah :

**“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”
(Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya saing, Sejahtera)**

Visi diatas dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi :

1. Kondisi masyarakat aman, agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, berbudaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun.
2. Masyarakat yang berbudaya, adalah kondisi masyarakat yang cerdas (SMART) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung oleh pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi dan lebih kreatif (Inovatif) dan Produktif.
3. Masyarakat yang maju dan berdaya saing merupakan kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung sarana dan prasarana dan pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang termasuk persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan, yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang baik dan lebih merata, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.



Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai.
2. Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.
3. **Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.**
4. Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.
5. Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan.
6. Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Provinsi **Lampung “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera)**. Makna dari Visi tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

1. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Strategi ditujukan kepada perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, untuk menuju kesetaraan gender dan selanjutnya terhadap perempuan belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebagai subyek pembangunan;



2. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasa tenteram, aman, dan damai. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke **Tiga “Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas”** untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun komitmen dan agenda kerja utama kepala daerah dalam melaksanakan Misi ke-3 yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah :

**Misi ke Tiga : “Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan
Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang
Disabilitas”**

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3 Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas :

1. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;



2. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
3. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
4. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

Agenda Kerja Utama Kepala Daerah :

“Perempuan Berjaya” :

- a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
- b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi
- c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.

“Lampung Ramah Perempuan dan Anak”. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :

- a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
- b. Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
- c. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke 3: Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas	a. Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengimplemen tasikan PUG dan PPRG serta meningkatkan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan
2	Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
3	Sasaran: 1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Penyandang Disabilitas			
4	Agenda Kerja Utama : 1. Perempuan Berjaya 2. Lampung Ramah Perempuan dan Anak	b. Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Minim dan belum optimalnya program kerja yang berkaitan dengan TPPO yang ada di instansi	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak •



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		c. Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir disemua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak. d. Baru 13 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (diluar TBB dan Mesuji) e. Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belum maksimal f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana.	• Penempatan PMI perempuan menimbulkan permasalahan multidimensial yang merugikan baik secara material maupun non material. _ • Terbatasnya SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan memahami penilaian mandiri KLA • Belum optimalnya peran anggota gugus tugas KLA di dalam perencanaan KLA • Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai metode kontrasepsi	• Adanya komitmen untuk mencegah dan melindungi pekerja perempuan dan anak dari kasus perdagangan orang. • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya upaya sosialisasi Program KB kepada masyarakat • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan program KB



3.3. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian Renstra K/L. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. TPAK Perempuan
4. Indeks PUG Nasional

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
2. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun.
3. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA
4. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak



3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
2. Indeks Kualitas Keluarga

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN).
2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)
3. Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)



5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR 2018)
2. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)
3. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
4. Persentase Pemda melaksanakan layanan sesuai standar

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Maturitas SPIP
4. Nilai SAKIP



Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung berdasarkan Sasaran Renstra
K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	• IPG dan IDG relatif rendah dibanding dengan angka nasional dan daerah lain • Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di parlemen perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengimplementasikan PUG dan PPRG
	b. Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak.	• Belum terpenuhinya sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.	• Terbatasnya SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan memahami penilaian mandiri KLA • Belum optimalnya peran anggota gugus tugas KLA di dalam perencanaan KLA	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mewujudkan KLA agar tercapai Provinsi Layak Anak
	c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender	• Kurangnya implementasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kualitas keluarga terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pelaksanaan pembangunan kualitas keluarga di daerah Provinsi Lampung dan Kab/kota belum optimal.	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang PPPA



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan pemenuhan hak anak.		• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kualitas keluarga masih kurang.	
	d. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	• Kurangnya koordinasi antar instansi terkait • Tidak semua korban mau melapor • Implementasi aturan/kebijakan yang mendukung • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.	• Kurangnya koordinasi antar lembaga yang relevan dengan kasus yang dihadapi • Korban/enggan untuk melapor • Minim dan belum optimalnya program kerja yang berkaitan dengan TPPO yang ada di instansi • Penempatan PMI perempuan menimbulkan permasalahan multidimensial yang merugikan baik secara material maupun non material.	• Aturan/ kebijakan yang mendukung • Edukasi yang dilakukan di masyarakat. • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga PPA • Adanya komitmen untuk mencegah dan melindungi pekerja perempuan dan anak dari kasus perdagangan orang • Adanya kebijakan yang diterbitkan sebagai langkah untuk pembenahan dan menyelesaikan permasalahan PMI.



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan	- Belum ada regulasi daerah tentang SPPA dan belum ada forum koordinasi penyelenggaraan SPPA. - Belum ada regulasi daerah tingkat Provinsi tentang penyelenggaraan PATBM dan belum semua Kabupaten/Kota menerbitkan regulasi daerah tentang PATBM	- Adanya UU Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan peraturan pelaksanaannya. - Hasil pemetaan capaian PATBM tahun 2021 di 15 Kab/Kota menunjukkan bahwa jumlah unit PATBM yang telah dibentuk belum sebanding dengan jumlah pelatihan yang diselenggarakan.
	e. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Kurangnya kesadaran/edukasi dan kepedulian dari masyarakat sekitar terkait masalah kekerasan pada anak	- Anak tidak/belum memahami apa yang terjadi pada dirinya. - Anak merasa takut karena mendapat ancaman dan iming-iming dari pelaku - Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Edukasi pada anak sebagai upaya preventif yang dapat mengurangi kasus kekerasan
	f. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA			



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tidak ada indikasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tidak ada indikasi terhadap Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Berikut adalah isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :

- 1 Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki.
- 2 Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan secara optimal.
- 3 Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan.
- 4 Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak.
- 5 Upaya peningkatan kualitas SDM OPD dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG)



- 6 Pemahaman eksekutif maupun legislative tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan, yang mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang perlu untuk ditingkatkan
- 7 Kurangnya pemahaman dan komitmen para pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan Pembangunan PPPA
- 8 Kurangnya komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) terhadap Pembangunan PPPA
- 9 Belum Optimalnya produk hukum daerah sebagai tindak lanjut/implementasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang pembangunan PPPA
- 10 Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak
- 11 masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA (3ends)
- 12 Masih Rendahnya Pemenuhan Hak-hak anak dan perlindungan khusus anak di Kab/kota
- 13 Masih terjadinya kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan
- 14 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana
- 15 Terbatasnya SDM yang terlatih konvensi Hak Anak(KHA)
- 16 Kurangnya sinergitas/peran anggota gugus tugas KLA dengan Dinas PPPA

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

b. Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

c. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Persentase korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif

2. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Cakupan KB Aktif (CPR)



Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir 2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3,20
		Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	68,24

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selama tahun 2021-2024 tercantum pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	0,79	0,8	2,82	3,00	3,10	3,20	3,20
		b. Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	40	53,33	86,67	100	100	100	100
		c. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	a. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif (CPR)	%	14,05	15,9	66,88	67,29	67,71	68,24	68,24



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut :

Strategi :

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG dan peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
2. Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
3. Peningkatan efektivitas layanan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak.
4. Peningkatan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
5. Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dari semua sektor.
6. Meningkatkan penyebaran informasi Keluarga Berencana di tingkat masyarakat.
7. Komitmen bersama untuk kepala daerah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus anak di daerah.

Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pemahaman dan komitmen OPD dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan peningkatan persentase anggaran responsif gender terhadap APBD.
2. Memperkuat kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
3. Memperkuat jejaring melalui peningkatan jumlah instansi yang bekerjasama dengan Dinas PPPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
4. Meningkatkan jumlah Lembaga Masyarakat (non pemerintah) yang difasilitasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatkan persentase pelayanan tuntas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Meningkatkan jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
7. Meningkatkan jumlah akses layanan berkualitas yang ramah anak (Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ruang kreativitas, lingkungan ramah anak).
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.
9. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi PUHA terhadap pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
10. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan keluarga berencana.



Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terlihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”			
Misi III : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan I : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Sasaran I : Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Strategi : 1. Peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Arah Kebijakan : 1. Memperkuat pemahaman dan komitmen OPD dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan peningkatan persentase anggaran responsif gender terhadap APBD. 2. Memperkuat kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
	Sasaran II : Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Strategi : 1. Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dari semua sektor 2. Komitmen bersama untuk kepala daerah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus anak di daerah	Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan jumlah akses layanan berkualitas yang ramah anak (Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ruang kreativitas, lingkungan ramah anak). 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak 3. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi PUHA terhadap pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha



Visi : “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”			
Misi III : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran III : Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Strategi : 1. Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak 2. Peningkatan efektivitas layanan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak. 3. Peningkatan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	Arah Kebijakan : 1. Memperkuat kerjasama antar jejaring lembaga yang ada dalam pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. 2. Meningkatkan jumlah Lembaga Masyarakat (non pemerintah) yang difasilitasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Meningkatkan persentase pelayanan tuntas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 4. Meningkatkan jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan .
Tujuan II : Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Sasaran I : Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Strategi : 1. Meningkatkan penyebaran informasi Keluarga Berencana di tingkat masyarakat	Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan keluarga berencana



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, maka perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Berikut ini rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Permendagri no 86 Tahun 2017 :

- 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga**
 - a. Strategi Percepatan PUG dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan (APE)
 - b. Pengembangan PUG Ekonomi
 - c. Pembangunan Kualitas Keluarga
- 2. Program Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak**
 - a. Forum Anak Daerah
 - b. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
 - c. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- 3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat**
 - a. Sinkronisasi dan Monitoring Kasus Trafficking dan Ketenagakerjaan
 - b. Peningkatan Perlindungan Anak



- c. Perlindungan Perempuan dan Anak pada Daerah Rawan Konflik dan Bencana serta Penanganan Medis Korban Kekerasan oleh UPT PKTK
- 4. Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**
 - a. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman UPTD PPA
 - b. Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - c. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 5. Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - a. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b. Penyelenggaraan Data dan Informasi Gender
 - c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 - a. Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)
 - b. Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sejahtera
 - c. Pengembangan Informasi Dalduk/KB dan Pendidikan Kependudukan
- 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



- i. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis
Perkantoran
- 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**
 - a. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur
- 10. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta
Asset Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan, Laporan dan Evaluasi Kinerja
 - b. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN									
								2020		2021		2022		2023		2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	A. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Kab/ Kota	15	Kab/ Kota	15	609.418.100	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Strategi Percepatan PUG dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan (APE)	Jumlah peserta PUG dan PPRG Provinsi dan Kab/kota	orang	255	orang	400	158.206.600	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Pengembangan PUG Ekonomi	Jumlah Perempuan Miskin, Pelaku Usaha, dan Perempuan Kepala Keluarga Peserta Bimtek Ekonomi kreatif	Orang	1440	orang	120	16.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Pembangunan Kualitas Keluarga	Jumlah kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	orang	45	orang	540	434.294.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	B. Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Kab/ Kota	15	Kab/ Kota	15	226.807.960	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Forum Anak Daerah	Jumlah anak peserta FAD, FAN, dan HAN.	orang	60	Orang	40	26.695.200	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Kabupaten/ Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang Terevaluasi untuk Mencapai KLA	Kab/ Kota	8	Kab/ Kota	30	184.408.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN									
								2020		2021		2022		2023		2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Jumlah peserta Sosialisasi, advokasi dan pelatihan Puspaga	Kab/ Kota	8	orang	90	15.704.760	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	C. Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat	Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak	Kab/ Kota	15	%	100	333.764.300	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Sinkronisasi dan Monitoring Kasus Trafficking dan Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Rapat Evaluasi GT PP TPPO dan Pelatihan Kader Pencegahan dan Penanganan TPPO	orang	75	orang	60	32.362.900	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Peningkatan Perlindungan Anak	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Telah Membentuk Desa/ Kelurahan PATBM	Kab/ Kota	8	Kab/ Kota	0	2.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Perlindungan Perempuan dan Anak pada Daerah Rawan Konflik dan Bencana serta Penanganan Medis Korban Kekerasan oleh UPT PKTK	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak pada Daerah Rawan Konflik dan Bencana	orang	100	orang	300	299.141.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	D. Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	%	100	556.641.550	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Pelaksanaan Ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman UPTD P2TP2A	Jumlah bulan pelayanan tindak kekerasan dan pendamping	-	-	bulan	12	509.579.050	0	0	0	0	0	0	0	0



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN									
								2020		2021		2022		2023		2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2 Pelayanan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah bulan Pelayanan terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	bulan	12	bulan	12	24.409.500	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Pelayanan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah bulan Tindak Lanjut/ Penanganan yang dilakukan terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	bulan	12	bulan	12	22.653.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	E. Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date	Dokumen	8	Kab/Kota	15	58.239.800	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Penyelenggaraan Data dan Informasi Gender	Jumlah dokumen Terpilah Gender dan Hak Anak	Dokumen	2	Dokumen	0	2.005.700	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah publikasi KIE tentang PPPA	kali	4	kali	4	4.992.500	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah peserta Forum Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	orang	40	51.241.600	0	0	0	0	0	0	0	0



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN											
								2020		2021		2022		2023		2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk dan Keluarga Berencana	F. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB Aktif				74	184.236.760	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	1 Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	orang	450	126.325.760	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 Fasilitas Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kader Pembinaan Keluarga Sejahtera	-	-	orang	50	17.167.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3 Pengembangan Informasi Dalduk/KB dan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Peserta Pendidikan Kependudukan	-	-	orang	80	40.743.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentae Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	2.268.781.780	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Pemakaian Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	Bulan	12	217.562.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan Administrasi Keuangan	Bulan	12	Bulan	12	396.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan pengadaan ATK	bulan	12	bulan	12	16.499.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan pengadaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	bulan	12	bulan	12	13.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN									
								2020		2021		2022		2023		2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	-	unit	20	186.694.400	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 Penyediaan peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	Jumlah bulan Pengadaan Peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	bulan	12	buah	12	25.090.650	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	bulan	12	10.652.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	bulan	12	bulan	12	33.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi	bulan	12	bulan	12	1.157.503.430	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan tenaga PTHL	bulan	12	bulan	12	210.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor				100	530.304.630	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	-	unit	31	154.900.400	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhap	unit	-	unit	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di servis	unit	11	Unit	11	265.404.230	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diservis	unit	47	Unit	168	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN											
								2020		2021		2022		2023		2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			I. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				100	42.932.550	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1 Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	orang	-	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	Dokumen	5	Dokumen	5	42.932.550	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	-	stel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			J Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan				100	122.482.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1 Penyusunan, Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	8	Dokumen	8	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Keuangan OPD	Dokumen	4	Dokumen	4	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	17	Dokumen	17	67.646.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	dokumen	1	Dokumen	1	17.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
									4.933.609.930										



Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan/Material
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi



C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi



B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)
2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal

1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
2. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDIS I AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2021		2022		2023		2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	%	100	12.664.672.900	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100	%	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	17	Dokumen	17	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja PD	Dokumen	8	Dokumen	8	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	%	100	%	100	8.871.260.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN	bulan	14	bulan	14	8.571.260.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Keuangan	bulan	12	bulan	12	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan capaian keuangan	bulan	12	bulan	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD



**Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022			2023			2024			
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	%	100	%	100	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	Dokumen	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	%	100	%	100	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	4	Dokumen	4	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	30	orang	30	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	%	100	%	100	2.250.550.850	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	bulan	12	bulan	12	28.280.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	32	unit	102	150.230.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	bulan	12	15.156.650	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	bulan	12	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan penyediaan Bahan/ Material	bulan	12	bulan	12	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022			2023			2024			
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	bulan	12	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan konsultasi	bulan	12	bulan	12	1.919.884.200	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	191.330.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan	unit	31	unit	33	191.330.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	412.040.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi listrik	bulan	12	bulan	12	171.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	bulan	12	241.040.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	639.492.050	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diservis	unit	15	unit	11	399.271.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diservis	unit	168	unit	150	58.960.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang rehap	gedung	1	gedung	1	181.261.050	0	0	0	0	0	0	0	APBD			



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022			2023			2024			
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		I. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	388.145.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	162.926.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Pelatihan penguatan kapasitas PUG dan PPRG	orang	400	orang	450	162.926.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pesentase Kabupaten peserta bintek ekonomi kreatif bagi perempuan miskin kepala keluarga	%	0,0	%	86,7	225.219.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan miskin kepala keluarga pedesaan peserta bintek ekonomi kreatif	orang	120	orang	377	225.219.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang memperoleh KIE PPPA	%	26,67	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE PPPA	Unit		unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD			



**Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2021		2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		II. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	%	100	1.257.678.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	%	100	541.781.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat evaluasi GT TPPO dan pelatihan kader pencegahan dan penanganan TPPO	orang	60	orang	120	76.781.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bulan Operasional UPT PPA	bulan	12	bulan	12	465.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan	%	100	%	100	344.564.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Layanan Pengaduan UPT PPA	bulan	12	bulan	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2021		2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bulan pendampingan kasus kekerasan	bulan	0	bulan	12	329.564.000	0	0	0	0	0	0	DAK
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan	%	100	%	100	371.333.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah penanganan medis bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak pada daerah rawan konflik dan bencana	orang	300	orang	285	245.727.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bulan pendampingan kasus kekerasan	bulan	0	bulan	12	79.366.000	0	0	0	0	0	0	DAK
			3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan pendampingan kasus kekerasan	bulan	0	bulan	12	46.240.000	0	0	0	0	0	0	DAK



**Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022			2023			2024			
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		III. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kab/kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	%	100	429.000.400	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mengikuti Pelatihan dan Penilaian P3KSS dan GSI serta Ketahanan Keluarga	%	100	%	100	429.000.400	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	orang	540	orang	100	429.000.400	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
		IV. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	%	100	%	100	363.377.200	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak	%	100	%	100	363.377.200	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen Terpilah Gender dan Hak Anak	dokumen	0	dokumen	1	121.180.400	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah peserta forum PUSPA dan KIE PPA	orang	40	orang	100	242.196.800	0	0	0	0	0	0	0	APBD			



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022			2023			2024			
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	APBD			
		V. Meningkatkan Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	%	100	%	100	494.532.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	494.532.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan FAD, FAN dan HAN	orang	40	orang	335	154.528.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah peserta pelatihan puspaga	orang	30	orang	45	66.114.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimtek KHA, Evaluasi KLA dan Rapat Gugus Tugas dan Evaluasi KLA	orang	90	orang	200	273.890.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			



**Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022		2023		2024					
								Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		VI. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	%	100	%	100	111.098.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/kota peserta Pelatihan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	%	0	%	33,3	91.098.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kader PATBM	orang	0	orang	175	91.098.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan	%	100	%	100	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Bulan Pendampingan kasus	bulan	12	bulan	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDIS I AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2021		2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		VII. Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Akseptor KB Aktif	%	74	%	74,5	48.652.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kab/kota peserta Sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor Kab/Kota	%	26,7	%	100	48.652.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	Jumlah peserta Sosialisasi Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	orang	0	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD
			2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor kab/kota	orang	80	orang	125	48.652.000	0	0	0	0	0	0	APBD



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022		2023		2024					
								Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		VIII. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana	%	40	%	100	61.302.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peersentase kab/kota Peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	%	40	%	100	61.302.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	orang	450	orang	240	61.302.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
		IX. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	X. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	33,3	%	46,7	176.086.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	%	33,3	%	46,7	120.380.000	0	0	0	0	0	0	0	APBD			
			1. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	orang	0	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD			



**Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATU AN	KONDIS I AWAL (2020)	SATU AN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2021		2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2. Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	orang	200	orang	300	120.380.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/Kota peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	%	33,3	%	100	55.706.000	0	0	0	0	0	0	APBD
			1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	orang	250	orang	40	55.706.000	0	0	0	0	0	0	APBD
Total Pagu Anggaran									15.994.543.500							



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2022-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16		
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	%	100	12.353.150.000	100	12.197.472.866	100	12.758.151.227	APBD		
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	APBD		
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	17	Dokumen	17	150.000.000	17	150.000.000	17	15.000.000	APBD		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8	Dokumen	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	APBD		
			3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	-	Dokumen	0		0		0		APBD		
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	%	100	%	100	9.178.150.000	100	8.896.260.000	100	9.264.871.227	APBD		
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	Orang/bulan	77	8.378.150.000	77	8.471.260.000	77	8.839.871.227	APBD		
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	dokumen	4	725.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	APBD		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semest eran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semest eran SKPD	bulan	12	laporan	4	75.000.00 0	4	75.000.00 0	4	75.000.00 0	APBD		
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	%	100	%	100	50.000.0 00	100	50.000.0 00	100	50.000.0 00	APBD		
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1	laporan	1	50.000.00 0	1	50.000.00 0	1	50.000.00 0	APBD		
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	%	100	%	100	125.000. 000	100	75.000.0 00	100	75.000.0 00	APBD		
			1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	Dokumen	4	50.000.00 0	4	50.000.00 0	4	50.000.00 0	APBD		
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	30	orang	30	75.000.00 0	30	25.000.00 0	30	25.000.00 0	APBD		
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	%	100	%	100	1.498.95 9.000	100	1.567.41 1.866	100	1.613.28 0.000	APBD		
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bulan	12	paket	12	28.280.00 0	12	28.280.00 0	12	28.280.00 0	APBD		
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	32	paket	120	192.500.0 00	100	211.750.0 00	120	240.000.0 00	APBD		
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	bulan	12	paket	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	APBD		
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12	paket	12	25.000.00 0	12	25.000.00 0	12	25.000.00 0	APBD		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16		
			5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	bulan	12	paket	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	APBD		
			6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	bulan	12	laporan	12	79.000.000	12	79.000.000	12	79.000.000	APBD		
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	laporan	12	1.133.179.000	12	1.182.381.866	12	1.200.000.000	APBD		
			F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	135.740.000	100	156.101.000	100	300.000.000	APBD		
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	31	unit	50	135.740.000	60	156.101.000	80	300.000.000	APBD		
			G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	557.070.000	100	620.200.000	100	680.000.000	APBD		
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	laporan	12	148.000.000	12	170.200.000	12	220.000.000	APBD		
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	laporan	12	409.070.000	12	450.000.000	12	460.000.000	APBD		
			H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	608.231.000	100	632.500.000	100	710.000.000	APBD		
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	15	unit	11	399.271.000	11	400.000.000	11	400.000.000	APBD		
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diptelihara	unit	168	unit	160	58.960.000	170	60.000.000	180	70.000.000	APBD		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						SUMBER DANA
								2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	gedung	1	unit	1	150.000.000	1	172.500.000	1	240.000.000	APBD
		I. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	475.000.000	100	690.000.000	100	740.000.000	APBD
			A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	225.000.000	100	260.000.000	100	280.000.000	APBD
			1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif gender (PPRG)	orang	400	perangkat daerah	50	225.000.000	50	260.000.000	50	280.000.000	APBD
			B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten peserta bimtek ekonomi kreatif bagi perempuan miskin kepala keluarga	%	0,0	%	86,7	250.000.000	86,7	280.000.000	86,7	300.000.000	APBD
			1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	orang	120	Dokumen	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	APBD



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16		
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang memperoleh KIE PPPA	%	26,67	%	66,67	-	100	150.000.000	100	160.000.000	APBD		
			1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang tersedia	unit	4	Dokumen	0	-	1	150.000.000	1	160.000.000	APBD		
		II. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	%	100	1.176.800.000	100	1.422.330.000	100	1.482.330.000	APBD		
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	%	100	617.410.000	100	680.000.000	100	720.000.000	APBD		
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	orang	60	Dokumen	1	262.410.000	1	180.000.000	1	200.000.000	APBD		
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	bulan	12	perangkat daerah	15	355.000.000	15	500.000.000	15	520.000.000	APBD		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						SUMBER DANA
								2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16
			B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan kasus kekerasan	%	100	%	100	282.044.000	100	379.564.000	100	379.564.000	APBD
			1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/ kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	bulan	12	orang	50	20000000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	bulan	0	layanan	50	262.044.000	50	329.564.000	50	329.564.000	DAK
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase pelayanan medis korban tindak kekerasan	%	100	%	100	277.346.000	100	362.766.000	100	382.766.000	APBD
			1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	orang	300	laporan	1	200.540.000	1	230.000.000	1	250.000.000	APBD



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						SUMBER DANA
								2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	bulan	0	orang	30	76.806.000	30	79.366.000	30	79.366.000	DAK
			3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	bulan	0	Dokumen	0	-	1	53.400.000	1	53.400.000	DAK
	III. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD
			A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mengikuti Pelatihan dan Penilaian P3KSS dan GSI serta Ketahanan Keluarga	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD
			1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	orang	540	laporan	1	525.000.000	1	600.000.000	1	620.000.000	APBD



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16		
		IV. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Kab/kota yang memiliki Data Gender dan Anak yang Up to Date	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD		
			A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang memiliki data gender dan anak	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD		
			1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	dokumen	0	dokumen	1	198.919.000	1	240.000.000	1	250.000.000	APBD		
			2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	orang	40	dokumen	1	301.081.000	1	200.000.000	1	220.000.000	APBD		
		V. Meningkatkan Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD		
			A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD		
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	40	Dokumen	1	199.216.000	1	240.000.000	1	260.000.000	APBD		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16		
			2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	30	Dokumen	1	136.411.000	1	170.000.000	1	190.000.000	APBD		
			3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	orang	90	Dokumen	1	364.373.000	1	420.000.000	1	450.000.000	APBD		
		VI. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	%	100	%	100	175.000.000	100	232.500.000	100	250.000.000	APBD		
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota peserta Pelatihan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	%	0	%	100	150.000.000	100	182.500.000	100	200.000.000	APBD		
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	orang	0	dokumen	1	150.000.000	1	182.500.000	1	200.000.000	APBD		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						SUMBER DANA
								2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16
			B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pendampingan kasus kekerasan	%	100	%	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	bulan	12	layanan	50	25.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD
		VII. Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	unmet Need	%		%	8	90.000.000	8,0	160.000.000	8	180.000.000	APBD
			A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kab/kota peserta Sosialisasi pendidikan kependudukan dan Rakor Kab/Kota	%	26,7	%	100	90.000.000	100,0	160.000.000	100	180.000.000	APBD
			1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KBPK)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana)	orang	0	dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD
			2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	orang	80	Dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16		
		VIII. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana	%	40	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD		
			A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peersentase kab/kota Peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	%	40	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD		
			1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah laporan hasil pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	orang	450	laporan	1	140.000.000	1	165.000.000	1	190.000.000	APBD		
		IX. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	33,3	%	100	270.000.000	100	370.000.000	100	420.000.000	APBD		
			A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	%	33,3	%	100	180.000.000	100	260.000.000	100	290.000.000	APBD		
			1. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah laporan hasil pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja	orang	0	laporan	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD		
			2. Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiaapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiaapan pengasuhan 1000 HPK	orang	200	Dokumen	1	180.000.000	1	210.000.000	1	240.000.000	APBD		



Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN						SUMBER DANA
								2022		2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16
			B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/Kota peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	%	33,3	%	100	90.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000	APBD
			1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	orang	250	dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD
			Total Pagu Anggaran						16.404.950.000		17.107.302.866		18.010.481.227	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.



Tabel 7.1
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RENSTRA Tahun 2019-2024**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	2,82	2,82	3,00	3,10	3,20	3,20	
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	46,67	86,67	100	100	100	100	
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan KB Aktif (CPR)	74,14	66,88	67,29	67,71	68,24	68,24	



BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah selama lima tahun dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan RW. Monginsidi No. 69 Teluk Betung – Bandar Lampung

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : SK / 02 /V.09/2022

TENTANG

**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat 4, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung periode 2019-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, diperlukan Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut dan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama 5 tahun ke depan, perlu membentuk Tim yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2606);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD dan selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Rencana Anggaran sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2019-2024 adalah merupakan pagu indikatif dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran setiap tahunnya;
- KELIMA** : Tim Penyusun Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung periode 2019-2024 sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001

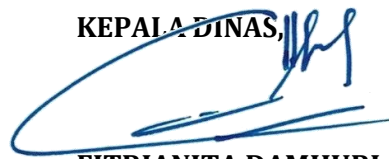
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG
Nomor : SK / 02 /V.09/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2019-2024**

- I. Penasehat : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sub Koordinator Perencana Ahli Muda
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas
Keluarga
2. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Anak
5. Kepala UPTD PPA
6. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Keuangan
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD-PPA
9. Seksi Pelayanan dan Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan
10. Seksi Pelayanan dan Penanganan Kekerasan Terhadap
Anak
11. Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

Alamat : Jln. R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung Bandar Lampung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : SK / 01 /V.09/2022

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor : PER/9/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS,



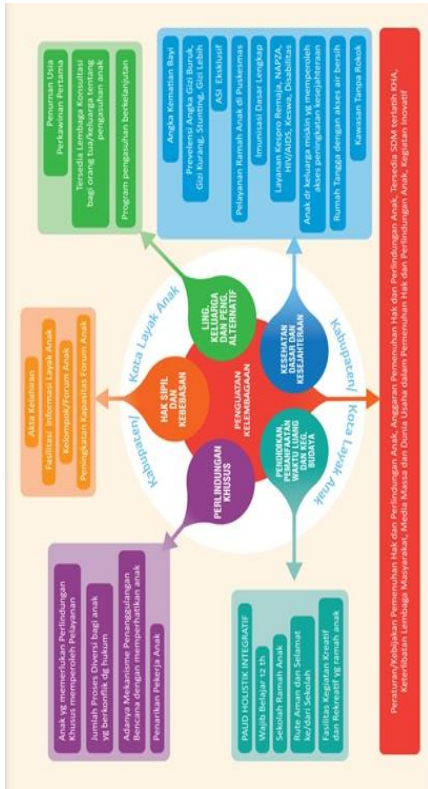
FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 Nomor : SK / 01 / V.09/2022
 Tanggal : 4 Januari 2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	Makna Indikator: Anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Meningkatkan Alasan Pemilihan : Untuk Mengetahui tingkat implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung Rumus Perhitungan : Jumlah Anggaran Responsif Gender dibagi Jumlah Anggaran Belanja Langsung Provinsi Lampung dikali 100	Laporan data anggaran responsive gender Dinas PPPA Provinsi Lampung	0,8	2,82	3	3,1	3,2
2.	Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	%	Makna Indikator : Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Alasan Pemilihan : 1. Untuk mengetahui sejauh mana Pemenuhan hak dan Perlindungan anak di Provinsi Lampung 2. Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	53,33	86,67	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA/ UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET			
				Rumus Perhitungan : 					
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	%	Makna Indikator : Penanganan Korban kekerasan Perempuan dan Anak secara menyeluruh (Pengaduan, Medis, Pendampingan, Psikologi, dan Rumah Aman) Alasan Pemilihan : Untuk Mengetahui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung Rumus Perhitungan : Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan penanganan komprehensif dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dikali 100	UPTD PPA Dinas PPPA Provinsi Lampung	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA/UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	%	Makna Indikator : cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur Alasan pemilihan : Untuk mengetahui jumlah pasangan usia subur yang Ber KB Rumus Perhitungan : Jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100	BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung	15,9	66,88	67,29	67,71	68,28

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS,

FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001

FORM ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022-2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	%	100	12.353.150.000	100	12.197.472.866	100	12.758.151.227	APBD		
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	APBD		
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	17	Dokumen	17	150.000.000	17	150.000.000	17	15.000.000	APBD		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8	Dokumen	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	APBD		
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	-	Dokumen	0		0		0		APBD		
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	%	100	%	100	9.178.150.000	100	8.896.260.000	100	9.264.871.227	APBD		
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	Orang/ bulan	77	8.378.150.000	77	8.471.260.000	77	8.839.871.227	APBD		
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	dokumen	4	725.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	APBD		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	bulan	12	laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	APBD		
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	%	100	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD		
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1	laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD		
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	%	100	%	100	125.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	APBD		
			1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	APBD		
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	30	orang	30	75.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	APBD		
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	%	100	%	100	1.498.959.000	100	1.567.411.866	100	1.613.280.000	APBD		
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bulan	12	paket	12	28.280.000	12	28.280.000	12	28.280.000	APBD		
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	32	paket	120	192.500.000	100	211.750.000	120	240.000.000	APBD		
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	bulan	12	paket	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	APBD		
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12	paket	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	APBD		
			5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	bulan	12	paket	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	APBD		
			6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	laporan	12	79.000.000	12	79.000.000	12	79.000.000	APBD		
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	laporan	12	1.133.179.000	12	1.182.381.866	12	1.200.000.000	APBD		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	135.740.000	100	156.101.000	100	300.000.000	APBD		
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	31	unit	50	135.740.000	60	156.101.000	80	300.000.000	APBD		
			G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	557.070.000	100	620.200.000	100	680.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	laporan	12	148.000.000	12	170.200.000	12	220.000.000	APBD		
			2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	laporan	12	409.070.000	12	450.000.000	12	460.000.000	APBD		
			H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	608.231.000	100	632.500.000	100	710.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	15	unit	11	399.271.000	11	400.000.000	11	400.000.000	APBD		
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	168	unit	160	58.960.000	170	60.000.000	180	70.000.000	APBD		
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	1	unit	1	150.000.000	1	172.500.000	1	240.000.000	APBD		
	I. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD		II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender 2.Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	475.000.000	100	690.000.000	100	740.000.000	APBD		
			A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	225.000.000	100	260.000.000	100	280.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif gender (PPRG)	orang	400	perangkat daerah	50	225.000.000	50	260.000.000	50	280.000.000	APBD		
			B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif	%	0,0	%	86,7	250.000.000	86,7	280.000.000	86,7	300.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	orang	120	Dokumen	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	APBD		
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PPPA	%	26,67	%	26,67	-	26,67	150.000.000	26,67	160.000.000	APBD		
			1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang tersedia	unit	4	Dokumen	0	-	1	150.000.000	1	160.000.000	APBD		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA					
								2022				2023						2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	II. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Persentase Perempuan Korban kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	%	15.5	%	13.04	1.176.800.000	12,8	1.422.330.000	12,5	1.482.330.000	APBD							
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1% Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 2%Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Ketentuan	%	100	%	100	617.410.000	100	680.000.000	100	720.000.000	APBD							
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	orang	60	Dokumen	1	262.410.000	1	180.000.000	1	200.000.000	APBD							
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	bulan	12	perangkat daerah	15	355.000.000	15	500.000.000	15	520.000.000	APBD							
			B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	%	100	%	100	282.044.000	100	379.564.000	100	379.564.000	APBD							
			1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	bulan	12	orang	50	200000000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD							
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	bulan	0	layanan	50	262.044.000	50	329.564.000	50	329.564.000	DAK							
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Perlindungan Perempuan dalam Konflik Sosial	%	100	%	100	277.346.000	100	362.766.000	100	382.766.000	APBD							
			1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	orang	300	laporan	1	200.540.000	1	230.000.000	1	250.000.000	APBD							
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	bulan	0	orang	30	76.806.000	30	79.366.000	30	79.366.000	DAK							
			3. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	bulan	0	Dokumen	0	-	1	53.400.000	1	53.400.000	DAK							

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		III. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD			
			A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Sehat Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD			
			1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	orang	540	laporan	1	525.000.000	1	600.000.000	1	620.000.000	APBD			
		IV. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD			
			A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi yang di up date	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD			
			1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	dokumen	0	dokumen	1	198.919.000	1	240.000.000	1	250.000.000	APBD			
			2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	orang	40	dokumen	1	301.081.000	1	200.000.000	1	220.000.000	APBD			
		V. Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD			
			A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	40	Dokumen	1	199.216.000	1	240.000.000	1	260.000.000	APBD			
			2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	30	Dokumen	1	136.411.000	1	170.000.000	1	190.000.000	APBD			
			3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	orang	90	Dokumen	1	364.373.000	1	420.000.000	1	450.000.000	APBD			

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA		
								2022				2023					2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		VI. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perempuan dan Anak	VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.Rasio Kekerasan Terhadap Anak 2.Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	%	1,98 100	%	1,82 100	175.000.000	1,77 100	232.500.000	1,75 100	250.000.000	APBD				
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif di Masyarakat	%	0	%	100	150.000.000	100	182.500.000	100	200.000.000	APBD				
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	orang	0	dokumen	1	150.000.000	1	182.500.000	1	200.000.000	APBD				
			B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	100	%	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD				
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	bulan	12	layanan	50	25.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD				
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	0	%	100	76.806.000	100	63.750.000	100	63.750.000	DAK				
			1.Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Ushur Kewenangan Provinsi	%	0	%	100	76.806.000	100	65.750.000	100	63.750.000	DAK				
		VII. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	umut	%	13,25	%	8	90.000.000	8,0	160.000.000	8	180.000.000	APBD				
			A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Kependudukan	%	100,0	%	100	90.000.000	100,0	160.000.000	100	180.000.000	APBD				
			1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (banggaencana)	orang	0	dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD				
			2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	orang	80	Dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD				

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		VIII. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	%	100	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD		
			A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal (KB) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan KIE Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	%	100	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD		
			1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah laporan hasil pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	orang	450	laporan	1	140.000.000	1	165.000.000	1	190.000.000	APBD		
		IX. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	46,7	%	100	270.000.000	100	370.000.000	100	420.000.000	APBD		
			A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	46,7	%	100	180.000.000	100	260.000.000	100	290.000.000	APBD		
			1. Peningkatan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah laporan hasil pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja	orang	0	laporan	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD		
			2. Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah dokumen hasil fasilitas, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyediaan pengasuhan 1000 HPK	orang	200	Dokumen	1	180.000.000	1	210.000.000	1	240.000.000	APBD		
			B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/kota yang mendapatkan edukasi pembangunan keluarga	%	33,3	%	100	90.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000	APBD		
			1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	orang	250	dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD		
									16.404.950.000		17.107.302.866		18.010.481.227			

Bandar Lampung,
KEPALA DINAS,

FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.
NIP. 19780419 199612 2 001

FORM ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022-2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	%	100	12.353.150.000	100	12.197.472.866	100	12.758.151.227	APBD		
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	APBD		
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	17	Dokumen	17	150.000.000	17	150.000.000	17	15.000.000	APBD		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8	Dokumen	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	APBD		
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	-	Dokumen	0		0		0		APBD		
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	%	100	%	100	9.178.150.000	100	8.896.260.000	100	9.264.871.227	APBD		
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	Orang/ bulan	77	8.378.150.000	77	8.471.260.000	77	8.839.871.227	APBD		
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	dokumen	4	725.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	APBD		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/trivulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/trivulanan/semesteran SKPD	bulan	12	laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	APBD		
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	%	100	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD		
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1	laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD		
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	%	100	%	100	125.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	APBD		
			1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	APBD		
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	30	orang	30	75.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	APBD		
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	%	100	%	100	1.498.959.000	100	1.567.411.866	100	1.613.280.000	APBD		
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bulan	12	paket	12	28.280.000	12	28.280.000	12	28.280.000	APBD		
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	32	paket	120	192.500.000	100	211.750.000	120	240.000.000	APBD		
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	bulan	12	paket	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	APBD		
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12	paket	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	APBD		
			5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	bulan	12	paket	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	APBD		
			6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	laporan	12	79.000.000	12	79.000.000	12	79.000.000	APBD		
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	laporan	12	1.133.179.000	12	1.182.381.866	12	1.200.000.000	APBD		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	135.740.000	100	156.101.000	100	300.000.000	APBD		
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	31	unit	50	135.740.000	60	156.101.000	80	300.000.000	APBD		
			G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	557.070.000	100	620.200.000	100	680.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	laporan	12	148.000.000	12	170.200.000	12	220.000.000	APBD		
			2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	laporan	12	409.070.000	12	450.000.000	12	460.000.000	APBD		
			H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	608.231.000	100	632.500.000	100	710.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	15	unit	11	399.271.000	11	400.000.000	11	400.000.000	APBD		
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	168	unit	160	58.960.000	170	60.000.000	180	70.000.000	APBD		
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	1	unit	1	150.000.000	1	172.500.000	1	240.000.000	APBD		
	I. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD		II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	I.Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender 2.Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	475.000.000	100	690.000.000	100	740.000.000	APBD		
			A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	225.000.000	100	260.000.000	100	280.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif gender (PPRG)	orang	400	perangkat daerah	50	225.000.000	50	260.000.000	50	280.000.000	APBD		
			B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif	%	0,0	%	86,7	250.000.000	86,7	280.000.000	86,7	300.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	orang	120	Dokumen	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	APBD		
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PPPA	%	26,67	%	26,67	-	26,67	150.000.000	26,67	160.000.000	APBD		
			1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang tersedia	unit	4	Dokumen	0	-	1	150.000.000	1	160.000.000	APBD		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA		
								2022				2023					2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	II. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	%	100	%	100	1.176.800.000	100	1.422.330.000	100	1.482.330.000	APBD				
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1% Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 2%Pendamangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Ketentuan	%	100	%	100	617.410.000	100	680.000.000	100	720.000.000	APBD				
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	orang	60	Dokumen	1	262.410.000	1	180.000.000	1	200.000.000	APBD				
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	bulan	12	perangkat daerah	15	355.000.000	15	500.000.000	15	520.000.000	APBD				
			B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	%	100	%	100	282.044.000	100	379.564.000	100	379.564.000	APBD				
			1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	bulan	12	orang	50	20000000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD				
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	bulan	0	layanan	50	262.044.000	50	329.564.000	50	329.564.000	DAK				
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Perlindungan Perempuan dalam Konflik Sosial	%	100	%	100	277.346.000	100	362.766.000	100	382.766.000	APBD				
			1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	orang	300	laporan	1	200.540.000	1	230.000.000	1	250.000.000	APBD				
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	bulan	0	orang	30	76.806.000	30	79.366.000	30	79.366.000	DAK				
			3. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	bulan	0	Dokumen	0	-	1	53.400.000	1	53.400.000	DAK				

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		III. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD			
			A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Sehat Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD			
			1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	orang	540	laporan	1	525.000.000	1	600.000.000	1	620.000.000	APBD			
		IV. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD			
			A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi yang di up date	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD			
			1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	dokumen	0	dokumen	1	198.919.000	1	240.000.000	1	250.000.000	APBD			
			2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	orang	40	dokumen	1	301.081.000	1	200.000.000	1	220.000.000	APBD			
		V. Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD			
			A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	40	Dokumen	1	199.216.000	1	240.000.000	1	260.000.000	APBD			
			2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	30	Dokumen	1	136.411.000	1	170.000.000	1	190.000.000	APBD			
			3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	orang	90	Dokumen	1	364.373.000	1	420.000.000	1	450.000.000	APBD			

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA		
							2022				2023					2024	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		VI. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perempuan dan Anak	VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.Rasio Kekerasan Terhadap Anak 2.Persentase Anak yang Menerima Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	%	100	%	100	175.000.000	100	232.500.000	100	250.000.000	APBD			
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif di Masyarakat	%	0	%	100	150.000.000	100	182.500.000	100	200.000.000	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	orang	0	dokumen	1	150.000.000	1	182.500.000	1	200.000.000	APBD			
			B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menerima Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	100	%	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	bulan	12	layanan	50	25.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD			
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	0	%	100	76.806.000	100	63.750.000	100	63.750.000	DAK			
			1.Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Usah Kewenangan Provinsi	%	0	%	100	76.806.000	100	65.750.000	100	63.750.000	DAK			
		VII. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		%	13,25	%	8	90.000.000	8,0	160.000.000	8	180.000.000	APBD			
			A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Kependudukan	%	100,0	%	100	90.000.000	100,0	160.000.000	100	180.000.000	APBD			
			1. Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	Jumlah dokumen hasil penyerasan kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana)	orang	0	dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD			
			2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	orang	80	Dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD			

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024		Rp	Rp	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		VIII. Meningkatnya Partisipasi keluarga Berencana (KB)	IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	IX. PROGRAM Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	%	100	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD			
			A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan KIE Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	%	100	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD			
			1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah laporan hasil pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	orang	450	laporan	1	140.000.000	1	165.000.000	1	190.000.000	APBD			
		IX. Meningkatnya Partisipasi keluarga Berencana (KB)	X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	X. PROGRAM Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	46,7	%	100	270.000.000	100	370.000.000	100	420.000.000	APBD			
			A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	46,7	%	100	180.000.000	100	260.000.000	100	290.000.000	APBD			
			1. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah laporan hasil pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja	orang	0	laporan	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD			
			2. Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah dokumen hasil fasilitas, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyediaan pengasuhan 1000 HPK	orang	200	Dokumen	1	180.000.000	1	210.000.000	1	240.000.000	APBD			
			B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/kota yang mendapatkan edukasi pembangunan keluarga	%	33,3	%	100	90.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000	APBD			
			1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	orang	250	dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD			
									16.404.950.000		17.107.302.866		18.010.481.227				

Bandar Lampung,
KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.
NIP. 19780419 199612 2 001

FORM ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022-2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA				
								2022				2023					2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	%	100	12.353.150.000	100	12.197.472.866	100	12.758.151.227	APBD						
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	APBD						
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	17	Dokumen	17	150.000.000	17	150.000.000	17	15.000.000	APBD						
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8	Dokumen	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	APBD						
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	-	Dokumen	0		0		0		APBD						
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	%	100	%	100	9.178.150.000	100	8.896.260.000	100	9.264.871.227	APBD						
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	Orang/ bulan	77	8.378.150.000	77	8.471.260.000	77	8.839.871.227	APBD						
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	dokumen	4	725.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	APBD						
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/trivulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/trivulanan/semesteran SKPD	bulan	12	laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	APBD						
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	%	100	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD						
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1	laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD						
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	%	100	%	100	125.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	APBD						
			1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	APBD						
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	30	orang	30	75.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	APBD						
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	%	100	%	100	1.498.959.000	100	1.567.411.866	100	1.613.280.000	APBD						
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bulan	12	paket	12	28.280.000	12	28.280.000	12	28.280.000	APBD						
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	32	paket	120	192.500.000	100	211.750.000	120	240.000.000	APBD						
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	bulan	12	paket	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	APBD						
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12	paket	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	APBD						
			5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	bulan	12	paket	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	APBD						
			6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	laporan	12	79.000.000	12	79.000.000	12	79.000.000	APBD						
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	laporan	12	1.133.179.000	12	1.182.381.866	12	1.200.000.000	APBD						

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	135.740.000	100	156.101.000	100	300.000.000	APBD		
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	31	unit	50	135.740.000	60	156.101.000	80	300.000.000	APBD		
			G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	557.070.000	100	620.200.000	100	680.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	laporan	12	148.000.000	12	170.200.000	12	220.000.000	APBD		
			2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	laporan	12	409.070.000	12	450.000.000	12	460.000.000	APBD		
			H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	608.231.000	100	632.500.000	100	710.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	15	unit	11	399.271.000	11	400.000.000	11	400.000.000	APBD		
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	168	unit	160	58.960.000	170	60.000.000	180	70.000.000	APBD		
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	1	unit	1	150.000.000	1	172.500.000	1	240.000.000	APBD		
		I. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	I.Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender 2.Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	475.000.000	100	690.000.000	100	740.000.000	APBD		
			A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kab/Kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	225.000.000	100	260.000.000	100	280.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif gender (PPRG)	orang	400	perangkat daerah	50	225.000.000	50	260.000.000	50	280.000.000	APBD		
			B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pesentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif	%	0,0	%	86,7	250.000.000	86,7	280.000.000	86,7	300.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	orang	120	Dokumen	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	APBD		
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PPPA	%	26,67	%	26,67	-	26,67	150.000.000	26,67	160.000.000	APBD		
			Kewenangan Provinsi													
			1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang tersedia	unit	4	Dokumen	0	-	1	150.000.000	1	160.000.000	APBD		
			Kewenangan Provinsi													

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	II. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	%	100	%	100	1.176.800.000	100	1.422.330.000	100	1.482.330.000	APBD			
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1% Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 2%Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Ketentuan	%	100	%	100	617.410.000	100	680.000.000	100	720.000.000	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	orang	60	Dokumen	1	262.410.000	1	180.000.000	1	200.000.000	APBD			
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	bulan	12	perangkat daerah	15	355.000.000	15	500.000.000	15	520.000.000	APBD			
			B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	%	100	%	100	282.044.000	100	379.564.000	100	379.564.000	APBD			
			1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	bulan	12	orang	50	200000000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD			
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	bulan	0	layanan	50	262.044.000	50	329.564.000	50	329.564.000	DAK			
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Perlindungan Perempuan dalam Konflik Sosial	%	100	%	100	277.346.000	100	362.766.000	100	382.766.000	APBD			
			1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	orang	300	laporan	1	200.540.000	1	230.000.000	1	250.000.000	APBD			
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	bulan	0	orang	30	76.806.000	30	79.366.000	30	79.366.000	DAK			
			3. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	bulan	0	Dokumen	0	-	1	53.400.000	1	53.400.000	DAK			

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA		
								2022				2023					2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		III. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD				
			A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Sehat Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD				
			1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	orang	540	laporan	1	525.000.000	1	600.000.000	1	620.000.000	APBD				
		IV. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD				
			A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi yang di up date	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD				
			1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	dokumen	0	dokumen	1	198.919.000	1	240.000.000	1	250.000.000	APBD				
			2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	orang	40	dokumen	1	301.081.000	1	200.000.000	1	220.000.000	APBD				
		V. Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD				
			A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD				
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	40	Dokumen	1	199.216.000	1	240.000.000	1	260.000.000	APBD				
			2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	30	Dokumen	1	136.411.000	1	170.000.000	1	190.000.000	APBD				
			3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	orang	90	Dokumen	1	364.373.000	1	420.000.000	1	450.000.000	APBD				

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA		
								2022				2023					2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		VI. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.Rasio Kekerasan Terhadap Anak 2.Persentase Anak yang Menerima Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	%	100	%	100	175.000.000	100	232.500.000	100	250.000.000	APBD				
		A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif di Masyarakat	%	0	%	100	150.000.000	100	182.500.000	100	200.000.000	APBD				
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	orang	0	dokumen	1	150.000.000	1	182.500.000	1	200.000.000	APBD				
		B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menerima Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	100	%	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD				
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	bulan	12	layanan	50	25.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD				
		C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	0	%	100	76.806.000	100	63.750.000	100	63.750.000	DAK				
		1.Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Usah Kewenangan Provinsi	%	0	%	100	76.806.000	100	65.750.000	100	63.750.000	DAK				
		VII. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	umut penduduk	%	13,25	%	8	90.000.000	8,0	160.000.000	8	180.000.000	APBD				
			A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Kependudukan	%	100,0	%	100	90.000.000	100,0	160.000.000	100	180.000.000	APBD				
			1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPk)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga rencana)	orang	0	dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD				
			2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	orang	80	Dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD				

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		VIII. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	IX. Program Pengembangan Desa Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal (KB) sesuai Kearifan Budaya													

Bandar Lampung,
KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.
NIP. 19780419 199612 2 001

FORM ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG																				
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN												SUMBER DANA
								2021			2022			2023			2024			
								Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	%	100	12.664.672.900	0	0	0	0	0	0	APBD				
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keseluruhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100	%	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	17	Dokumen	17	150.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja PD	Dokumen	8	Dokumen	8	50.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	%	100	%	100	8.871.260.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN	bulan	14	bulan	14	8.571.260.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Keuangan	bulan	12	bulan	12	250.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah bulan dokumen Pelaporan capaian keuangan	bulan	12	bulan	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	%	100	%	100	25.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	Dokumen	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	%	100	%	100	75.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	4	Dokumen	4	50.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	30	orang	30	25.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			E. Administrasi Unum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi unum PD	%	100	%	100	2.250.550.850	0	0	0	0	0	0	APBD				
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	bulan	12	bulan	12	28.280.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	32	unit	102	150.230.000	0	0	0	0	0	0	APBD				
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	bulan	12	15.156.650	0	0	0	0	0	0	APBD				
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	bulan	12	25.000.000	0	0	0	0	0	0	APBD				

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN										SUMBER DANA
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peersentase kab/kota Peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	%	40	%	100	61.302.000	0	0	0	0	0	0	APBD		
			1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	orang	450	orang	240	61.302.000	0	0	0	0	0	0	APBD		
	IX. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)		X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	33,3	%	46,7	176.086.000	0	0	0	0	0	0	APBD		
			A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kab/kota peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	%	33,3	%	46,7	120.380.000	0	0	0	0	0	0	APBD		
			1. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	orang	0	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD		
			2. Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta sosialisasi edukasi dalam rangka penurunan angka stunting dan kemiskinan di kampung KB	orang	200	orang	300	120.380.000	0	0	0	0	0	0	APBD		
			B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/Kota peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	%	33,3	%	100	55.706.000	0	0	0	0	0	0	APBD		
			1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi pembangunan keluarga	orang	250	orang	40	55.706.000	0	0	0	0	0	0	APBD		
								</										

Bandar Lampung, Januari 2022
KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.
NIP. 19780419 199612 2 001

FORM ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG				TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN													
NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	2020									
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	A. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	Kab/ Kota	15	Kab/ Kota	15	609.418.100	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Strategi Percepatan PUG dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan (APE)	Jumlah peserta Penguatan Kapasitas PUG dan PPRG Provinsi dan Kab/kota	orang	255	orang	400	158.206.600	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Pengembangan PUG Ekonomi	Jumlah Perempuan Miskin, Pelaku Usaha, dan Perempuan Kepala Keluarga Peserta Bimtek Ekonomi kreatif	Orang	1440	orang	120	16.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Pembangunan Kualitas Keluarga	Jumlah kader P3KSS, GSI dan Ketahanan Keluarga	orang	45	orang	540	434.294.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	B. Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Kab/ Kota	15	Kab/ Kota	15	226.807.960	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Forum Anak Daerah	Jumlah anak peserta FAD, FAN, dan HAN.	orang	60	Orang	40	26.695.200	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang Terevaluasi untuk Mencapai KLA	Kab/ Kota	8	Kab/ Kota	30	184.408.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Jumlah peserta Sosialisasi, advokasi dan pelatihan Puspaga	Kab/ Kota	8	orang	90	15.704.760	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	C. Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat	Persentase Kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak	Kab/ Kota	15	%	100	333.764.300	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Sinkronisasi dan Monitoring Kasus Trafficking dan Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Rapat Evaluasi GT PP TPPO dan Pelatihan Kader Pencegahan dan Penanganan TPPO	orang	75	orang	60	32.362.900	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Peningkatan Perlindungan Anak	Jumlah Kabupaten / Kota yang Telah Membentuk Desa/ Kelurahan PATBM	Kab/ Kota	8	Kab/ Kota	0	2.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Perlindungan Perempuan dan Anak pada Daerah Rawan Konflik dan Bencana serta Penanganan Medis Korban Kekerasan oleh UPT PKTK	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak pada Daerah Rawan Konflik dan Bencana	orang	100	orang	300	299.141.400	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN											
								2020		2021		2022		2023		2024			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	D. Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	%	100	556.641.550	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1. Pelaksanaan ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman UPD P2TP2A	Jumlah bulan pelayanan tindak kekerasan dan pendamping	-	-	bulan	12	509.579.050	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Pelayanan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah bulan Pelayanan terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	bulan	12	bulan	12	24.409.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Pelayanan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah bulan Tindak Lanjut/ Penanganan yang dilakukan terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	bulan	12	bulan	12	22.653.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	E. Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kab/ Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date	Dokumen	8	Kah/ Kota	15	58.239.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1. Penyelenggaraan Data dan Informasi Gender	Jumlah dokumen Terpilah Gender dan Hak Anak	Dokumen	2	Dokumen	0	2.005.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah publikasi KIE tentang PPA	kali	4	kali	4	4.992.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah peserta Forum Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	orang	40	51.241.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	F. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB Aktif				74	184.236.760	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	1. Penguatan Program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	-	orang	450	126.325.760	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Fasilitas Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kader Pembinaan Keluarga Sejahtera	-	-	orang	50	17.167.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Pengembangan Informasi Dalduk/KB dan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Peserta Pendidikan Kependudukan	-	-	orang	80	40.743.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	2.268.781.780	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Pemakaian Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	Bulan	12	217.562.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan Administrasi Keuangan	Bulan	12	Bulan	12	396.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan pengadaan ATK	bulan	12	bulan	12	16.499.300	0	0	0	0	0	0	0	0		

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN																	
							2020		2021		2022		2023		2024									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pengadaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	bulan	12	bulan	12	13.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
			5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	-	unit	20	186.694.400	0	0	0	0	0	0	0	0							
			6 Penyediaan peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	Jumlah bulan Pengadaan Peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	bulan	12	bulan	12	25.090.650	0	0	0	0	0	0	0	0							
			7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	bulan	12	10.652.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
			8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	bulan	12	bulan	12	33.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
			9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi	bulan	12	bulan	12	1.157.503.430	0	0	0	0	0	0	0	0							
			10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan tenaga PTHL	bulan	12	bulan	12	210.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
			H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor				100	530.304.630	0	0	0	0	0	0	0	0							
			1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	-	unit	31	154.900.400	0	0	0	0	0	0	0	0							
			2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhap	unit	-	unit	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
			3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di servis	unit	11	Unit	11	265.404.230	0	0	0	0	0	0	0	0							
			4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diservis	unit	47	Unit	168	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
			I. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				100	42.932.550	0	0	0	0	0	0	0	0							
			1 Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	orang	-	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			2 Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab dll	Dokumen	5	Dokumen	5	42.932.550	0	0	0	0	0	0	0	0							
			3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	-	stel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			J Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan				100	122.482.500	0	0	0	0	0	0	0	0							
			1 Penyusunan, Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	8	Dokumen	8	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0							

NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN											
							2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Keuangan OPD	Dokumen	4	Dokumen	4	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	17	Dokumen	17	67.646.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	dokumen	1	Dokumen	1	17.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
									4.933.609.930	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bandar Lampung,
Kepala Dinas,



FITRIANITA DAMHURI, SSTP, M.S
NIP. 19780419 199612 2 001